

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DESA SEKBAN KABUPATEN FAKFAK DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



Disusun oleh:

Nama : Mirasty Manggalatu

NIM : 146220121060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DESA SEKBAN KABUPATEN FAKFAK DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk ujian skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh**

**Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DESA SEKBAN KABUPATEN FAKFAK DENGAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**NAMA : Mirasty Manggalatu**

**NIM : 146220121060**

**Telah disetujui oleh tim pembimbing**

**Pada , 17 Mei 2025**

**Pembimbing I**

**Munzir, S.E., M.Ak**

**NIDN. 1409039302**

  
.....

**Pembimbing II**

**Musriani, S.M., M.M.**

**NIDN. 1401129801**

  
.....

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DESA SEKBAN KABUPATEN FAKFAK DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**NAMA** : Mirasty Manggalatu  
**NIM** : 146220121060  
**WAKTU PENELITIAN** : 30 Oktober 2024 – 17 Mei 2025

Skripsi ini telah di uji oleh di uji oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 05 Juni 2025

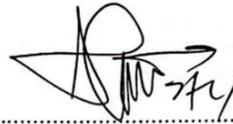
Dewan Penguji Skripsi  
Pembimbing Skripsi

Munzir, S.E., M.Ak.  
NIDN. 1409039302



Ketua Penguji

Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.  
NIDN. 1407039501



Anggota Penguji

Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt.  
NIDN. 1407079001



Sorong,  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnia dan Humaniora



Puad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.  
NIDN. 1419099401

**HALAMAN PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirasty Manggalatu

NIM : 146220121060

Judul Skripsi : **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 05 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan,



**Mirasty Manggalatu**

**146220121060**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan” (Boy Chandra)

Jika bukan Allah SWT yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah (Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan” (Nadin Amizah)”

### **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta yang selalu memberikan segalanya kepada penulis.

## **ABSTRAK**

Pengelolaan dana desa merupakan tantangan penting bagi aparat desa yang dapat menimbulkan potensi krusial dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap kinerja Pemerintah Desa Sekban, Kabupaten Fakfak, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 50 penerima BLT-DD di Desa Sekban pada tahun 2024, dan sampel diambil secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda serta uji moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, (2) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, (3) sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa, dan (4) sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen pemerintahan desa, serta implikasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BLT-DD melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal yang optimal.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Langsung Tunai, Kinerja Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA SEKBAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Bapak Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
3. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
4. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Musriani, S.M., M.M. selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.
6. Pemerintah Desa Sekban yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Alm. Bapak Laumar dan Ibu Sulfia yang telah memberikan segalanya kepada penulis.

8. Saudara Kandung Penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga tercintaku yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
10. Teruntuk diri saya sendiri Mirasty Manggalatu. Terimakasih sudah berjuang sampai detik ini, selalu kuat menghadapi level-level kehidupan berikutnya ya miwww.
11. Sahabat penulis, teman-teman seperjuangan Akuntansi 21 Official terkhusus Pelll, Pidiid, Pyuttt, Seribuuu, kacica, kadinn, intang dan teman kos penulis Putri Fajar yang selalu memberikan dukungan, dorongan, bantuan dan hiburan kepada penulis.
12. Seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya, namun sudah tertulis jelas di lauhul mahfudz untuk penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Sorong, 12 Juni 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Definisi Operasional Variabel .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.2 Akuntabilitas.....	12
2.3 Transparansi.....	14
2.4 Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD).....	16
2.5 Kinerja.....	18
2.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	20
2.7 Penelitian Terdahulu .....	24
2.8 Kerangka Pikir.....	29
2.9 Hipotesis .....	29
2.10 Research GAP .....	33

BAB III METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
3.3 Populasi dan Sampel/Subjek/Fokus .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5 Teknik Analisis Data .....	40
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.2 Deskripsi Responden Penerima Bantuan Langsung Tunai .....	46
4.3 Hasil Penelitian .....	48
4.4 Hasil Uji Kualitas Data .....	54
4.5 Hasil Uji Hipotesis .....	60
4.6 Pembahasan .....	65
BAB V PENUTUP .....	71
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Penerima BLT Tahun 2020 - 2024 .....	5
Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel .....	9
Tabel 3.1 Rencana Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Klasifikasi Jawaban Skala Likert .....	39
Tabel 4.1 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel 4.3 Informan Berdasarkan Usia .....	47
Tabel 4.4 Kelas Interval Kategori .....	48
Tabel 4.5 Deskripsi Item Pernyataan Variabel X1 .....	49
Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel X2 .....	50
Tabel 4.7 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Z .....	52
Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Y .....	53
Tabel 4.9 Pengujian Validitas Variabel (X1) .....	55
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Variabel (X2) .....	56
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Variabel (Z) .....	57
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Variabel (Y).....	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas X <sup>1</sup> .....	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas X <sup>2</sup> .....	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Z.....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Y .....	60
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ) Model Summary <sup>b</sup> .....	61
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t).....	62
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinan R <sup>2</sup> .....	63
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t).....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	84
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	90
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif .....	92
Lampiran 4 Uji Valditas.....	95
Lampiran 5 Uji Reliabilitas .....	99
Lampiran 6 Uji Hipotesis.....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan individu maupun kelompok dalam suatu komunitas, merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Kebahagiaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang semuanya saling berkaitan dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan, yang menjadi permasalahan ekonomi paling mendesak dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Lazulfa, 2024).

Sebagai bentuk tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah merancang berbagai program strategis. Salah satu program yang menonjol adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung kepada masyarakat desa, khususnya mereka yang terdampak situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Melalui BLT-DD, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa (Bappenas, 2021).

Menurut Kementerian Desa (2020), program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka serta meminimalkan dampak buruk akibat krisis ekonomi. BLT-DD, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pemberian akses langsung terhadap dana yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari (Fadhilla & Irham, 2024). Penetapan peraturan terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020b). Selain itu, BLT-DD tidak dikenakan pajak (Bappenas, 2020).

Selain itu, Permendes 6/2020 juga menegaskan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada Pasal 33 Ayat 5 Peraturan PMK Th 2021 No. 190 menyatakan bahwa besaran BLT Dana Desa untuk setiap keluarga penerima BLT adalah Rp300.000,- dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari pengelolaan yang baik terhadap BLT-DD dapat terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat (G. Sari, 2022). Dalam hal pengelolaan BLT Dana Desa, dapat dikatakan baik pemerintahannya apabila telah menjalankan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan (Triana et al., 2023). Maka dari itu, pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, setiap organisasi wajib dikelola secara transparan, akuntabel, melibatkan partisipasi masyarakat, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Untuk menjamin pemanfaatan dana yang efektif dan efisien, akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-DD menjadi hal yang sangat krusial. Rendahnya tingkat akuntabilitas dapat memicu penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abdullah et al., 2022) dalam (Diansari, Musah, et al., 2023). Akuntabilitas secara signifikan dapat meningkatkan jaminan umum, termasuk di tingkat desa. Hal ini menjadi kontrol bagi pemerintah desa atas semua tindakan yang dilakukan (Mahmud et al., 2024).

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Bakhtiar, 2021). Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga harus memenuhi sejumlah faktor tertentu, yaitu: (1) keterbukaan, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki akses untuk berpartisipasi; (2) semua kelompok dalam pemerintahan harus mengetahui informasi tersebut; (3) adanya partisipasi saat pengambilan keputusan anggaran desa; dan (4) mempertimbangkan pendapat masyarakat yang dituangkan dalam keputusan bersama (Triana et al., 2023).

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok dalam suatu komunitas merasakan kepuasan hidup yang mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian (Maspawati et al., 2023). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Desa Parenring. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya distribusi dana yang tepat dan berkelanjutan berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. (Triana et al., 2023) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLT-DD dapat memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan.

Sebagai kesimpulan, akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang esensial untuk membangun kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan efektivitas di sektor publik (Nnko, n.d.). (Lazulfa, 2024) dalam penelitiannya, menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dalam penyaluran BLT-DD di Desa Sera Tengah telah menunjukkan hasil yang positif terhadap penerimaan dan penggunaan dana oleh masyarakat. Selain itu, upaya desa untuk meningkatkan dialog terbuka dengan masyarakat mengenai alokasi dan tujuan penggunaan dana telah menambah mutu pelaksanaan bantuan sosial tersebut.

Penemuan-penemuan tersebut mendukung argumen bahwa kesejahteraan masyarakat lebih mungkin meningkat ketika terdapat interaksi yang jelas dan jujur antara pihak pengelola dana dengan warga setempat. Dari beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya terwujud melalui penerimaan bantuan ekonomi, tetapi juga melalui proses pengelolaan yang terbuka dan obyektif. Dalam kajian-kajian sebelumnya, beberapa penelitian telah menyoroti berbagai aspek terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta pengaruhnya terhadap masyarakat. (Agustin & Purba, 2023) melakukan penelitian di Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang fokus pada penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran BLT-DD.

Mereka menemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masih ada kendala yang menghambat efektivitas penyaluran, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan partisipasi yang minim dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan baik. Selanjutnya, (Maspawati et al., 2023) mengeksplorasi pengaruh BLT-DD terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Temuan ini menjelaskan bahwa BLT-DD memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial.

Namun, mereka juga mengidentifikasi tantangan dalam distribusi dan pemanfaatan dana yang perlu diatasi, seperti masalah birokrasi dan kesenjangan informasi. Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme distribusi untuk memastikan bahwa bantuan langsung tunai ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa meskipun BLT-DD memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, berbagai tantangan dalam akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme penyaluran masih perlu diatasi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sekban sendiri ada sejak tahun 2020 hingga 2024, ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19. Berikut ringkasan data terkait penerimaan BLT-DD tersebut.

**Tabel 1.1 Jumlah Data Penerima BLT Tahun 2020 - 2024**

No	Tahun Penerimaan BLT	Jumlah Penerima	Total Dana BLT
1.	2020	127 Orang	Rp457.200.000,-
2.	2021	127 Orang	Rp457.200.000,-
3.	2022	127 Orang	Rp457.200.000,-
4.	2023	70 Orang	Rp252.000.000,-
5.	2024	50 Orang	Rp180.000.000,-

Sumber: Pemerintah Desa Sekban

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerima BLT di Desa Sekban pada tahun 2020 hingga 2022 tercatat tetap sebanyak 127 orang dengan total dana Rp457.200.000 setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penerima menjadi 70 orang dengan total dana Rp252.000.000, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 50 orang dengan total dana Rp180.000.000. Penurunan jumlah penerima dan alokasi dana BLT dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di desa tersebut.

Dalam konteks ini, Pengendalian internal di Kampung Sekban menjadi elemen krusial untuk memastikan pengelolaan dana desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dilakukan secara efektif dan transparan. Pengendalian internal yang efektif memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sistem pengendalian internal yang baik mencakup prosedur yang jelas untuk penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan, serta mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana (Rahmany & Fatimah, 2020).

Penerapan pengendalian internal yang ketat di Kampung Sekban dapat membantu memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan turut berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya. Dengan demikian, pengendalian internal yang efektif tidak hanya berkontribusi pada kinerja pemerintah yang lebih baik, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kusnadi & Anwar, 2023).

Meskipun pengendalian internal telah diakui sebagai elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas, pemahaman mengenai perannya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah desa masih terbatas. Selain itu, berbagai tantangan dalam proses distribusi dan penerimaan bantuan menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran, serta peran pengendalian internal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana, yang masih kurang dibahas dalam literatur.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **"ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA SEKBAN KABUPATEN FAKFAK DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai?
3. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.
4. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen, khususnya terkait pemahaman terhadap sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya maupun dalam proses perumusan kebijakan.

## 2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memberikan acuan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang lebih optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

### **1.5 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono 2015 dalam (Kusnadi & Anwar, 2023), Definisi operasional suatu variabel merujuk pada atribut, karakteristik, atau nilai dari suatu objek atau aktivitas yang memiliki bentuk tertentu dan telah ditentukan oleh peneliti sebagai dasar untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Keberhasilan dalam operasionalisasi variabel sangat bergantung pada sejauh mana peneliti memahami variabel tersebut serta kemampuannya dalam mengubah variabel menjadi indikator yang dapat diukur secara empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi operasional variabel sebagai acuan utama. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Skala</b>
Akuntabilitas BLT DD	Pertanggungjawaban pemerintah desa atas kinerjanya, yang didukung oleh informasi teknis dan akuntansi yang menyediakan informasi tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (Martadinata & Safitri, 2024).	<i>Likert</i>
Transparansi BLT DD	Prinsip yang menjamin keterbukaan akses informasi kebijakan kepada publik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, hingga hasil dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Iznillah, dkk, 2018:29-41) dalam (Daud et al., 2022).	<i>Likert</i>
Sistem Pengendalian Internal	Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu proses yang melekat dalam setiap tindakan dan aktivitas organisasi, yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mattoasi et al., 2021).	<i>Likert</i>

---

Kinerja Pemerintah	Seberapa baik atau buruk suatu organisasi atau individu berfungsi sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Salah satu tanggungjawab utama organisasi sektor publik adalah menjamin kesejahteraan masyarakat (Haris et al., 2022).	<i>Likert</i>
-----------------------	--	---------------

---

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, kerangka pikir, dan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum Kampung Sekban, hasil penelitian berdasarkan pengolahan data, dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan teori keagenan sebagai hubungan kontrak antara prinsipal dan agen (Indriasih Dewi, 2022). Prinsipal adalah pihak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada agen untuk membuat keputusan sesuai dengan kesepakatan, tanpa merugikan kedua belah pihak (Sonbay, 2022). Teori ini dimanfaatkan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori keagenan sebagai sebuah grand theory mengimplikasikan bahwa para prinsipal membutuhkan pengetahuan untuk menilai jalan pemerintah desa dalam membangun praktik-praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan (Kusumo et al., 2022).

Dalam ranah perusahaan, teori keagenan menjelaskan bahwa pemilik perusahaan atau pemegang saham menyerahkan wewenang kepada manajemen untuk mengelola operasional perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Manajemen akan bertindak sejalan dengan kepentingan pemilik apabila keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat memberikan mandat atau kuasa kepada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat, karena pada dasarnya mereka bertugas untuk melayani masyarakat (Sonbay, 2022).

Teori keagenan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sering terjadi dalam hubungan keagenan. Masalah pertama yang sering muncul dalam hubungan keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, masalah ini disebabkan karena adanya asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri

informasi dapat didefinisikan sebagai perbedaan informasi antara agen dan prinsipal (Wahyudi et al., 2021).

Dalam teori keagenan, interaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilihat sebagai hubungan keagenan, di mana masyarakat (sebagai prinsipal) memanfaatkan pemerintah (sebagai agen) untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kepentingan mereka (Audia & Mulyani, 2023). Dalam konteks penelitian ini, implikasi dari teori keagenan adalah untuk memantau perilaku pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan dan laporan yang disusun secara berkala, serta mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Akuntabilitas**

Berdasarkan penjelasan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan atau mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, menurut Adejuwon (2019), akuntabilitas harus ditegakkan secara ketat dalam administrasi operasi sektor publik guna mendorong tata kelola yang baik, dan ketiadaan akuntabilitas adalah penyebab utama dari tata kelola yang buruk (Napari & Amaning, 2022).

Di dalam sektor publik juga penguatan akuntabilitas memerlukan integrasi pelaporan keuangan yang andal, peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan, dan kebijakan ketat untuk memastikan kepatuhan (Baina & Michael, 2020). Permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu lemahnya komitmen organisasi pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan rendahnya kompetensi perangkat desa. Perangkat organisasi pemerintah desa perlu memiliki komitmen organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat desa agar dapat mencapai tujuan organisasi dan membangun akuntabilitas ke arah yang lebih baik (Muhrayani et al., 2021) dalam (Diansari, Othman, et al., 2023)

### **2.2.1 Karakteristik Akuntabilitas**

Berdasarkan karakteristiknya, akuntabilitas memiliki beberapa ciri sebagai berikut (Kusnadi & Anwar, 2023):

1. Berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal: Artinya, setiap pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada pencapaian output dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan pengukuran kinerja: Ini mengindikasikan bahwa harus ada standar yang ditetapkan untuk mengukur kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang bermutu: Artinya, informasi yang diperoleh harus memenuhi standar kualitas yang tinggi agar dapat digunakan secara efektif.
4. Penghasilan data secara berkala: Ini menunjukkan bahwa data harus tersedia pada setiap periode waktu tertentu.
5. Menyampaikan laporan hasil secara transparan dan berkala: Artinya, proses pelaporan harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan rutin untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.

Karakteristik-karakteristik tersebut semestinya menjadi landasan yang mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam memastikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

### **2.2.2 Prinsip Akuntabilitas**

Terdapat beberapa prinsip dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut (Goo & Sanda, 2022):

1. Diperlukan adanya komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai instansi dalam melaksanakan misi organisasi secara akuntabel.
2. Harus tersedia sistem yang menjamin pemanfaatan sumber daya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Sistem tersebut juga perlu mampu mengukur sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan.

4. Fokus utama harus diarahkan pada realisasi visi dan misi organisasi, serta hasil dan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaannya.
5. Prinsip kejujuran, objektivitas, keterbukaan, dan inovasi perlu dijadikan dasar untuk mendorong transformasi dalam manajemen instansi pemerintah.

### **2.3 Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2012:30), transparansi mengacu pada kesediaan pemerintah untuk secara terbuka memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan yang relevan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi terkait lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan (Fajri dkk. 2021) dalam (Junaidi & Adnan, 2023).

Sementara itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun pada level yang lebih luas. Keterbukaan tersebut menjamin hak setiap warga untuk mengakses informasi mengenai jalannya pemerintahan, termasuk kebijakan yang ditetapkan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, transparansi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan oleh masyarakat.

#### **2.3.1 Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut (Atika, 2023):

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial guna mencegah terjadinya penyimpangan.
2. Menghindari perbedaan persepsi di antara berbagai pihak.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang disertai rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya.
4. Menumbuhkan kepercayaan antar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

### **2.3.2 Karakteristik Transparansi**

Transparansi mempunyai tiga karakteristik yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018:19) dalam (Lazulfa, 2024) yaitu:

1. Informatif: Menyediakan informasi, berita, dan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai mekanisme, tahapan, data, serta fakta yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang memerlukan informasi dapat memperolehnya secara mudah dan terbuka.
2. Keterbukaan: Hak untuk mengakses informasi publik adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui data yang disediakan oleh lembaga publik. Sangat penting untuk menekankan bahwa semua informasi yang bersifat publik harus dapat diakses dan tersedia bagi seluruh pengguna informasi tanpa terkecuali.
3. Pengungkapan: Memberikan informasi kepada masyarakat atau publik, termasuk para pemangku kepentingan, mengenai aktivitas dan kinerja keuangan yang dilakukan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai proses pengelolaan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik transparansi yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan dan keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

### **2.3.3 Prinsip Transparansi**

Keterbukaan informasi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip yang paling umum dan diakui secara global adalah sebagai berikut (G. Sari, 2022):

1. *Maximum Acces Limited Exemption (MALE)*

Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka untuk diakses publik, kecuali jika pengungkapannya dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pengecualian ini harus bersifat terbatas, artinya: (1) hanya jenis informasi tertentu yang dikecualikan, dan (2) sifat pengecualian tersebut tidak berlangsung selamanya.

#### 2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan

Setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang dapat meminta informasi tanpa perlu memberikan alasan mengenai kebutuhan mereka akan informasi tersebut.

#### 3. Prosedur yang Mudah, Cepat, dan Efisien

Nilai suatu informasi sangat bergantung pada ketepatan waktu penyampaiannya. Informasi yang diterima terlalu lama bisa kehilangan relevansi karena sudah tergantikan oleh data baru.

#### 4. Informasi Yang Akurat dan Lengkap

Informasi yang diberikan kepada pemohon harus disajikan secara menyeluruh dan sesuai fakta. Informasi yang keliru atau tidak lengkap berisiko menyesatkan dan menimbulkan kesalahpahaman.

#### 5. Informasi Proaktif

Instansi publik memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menyampaikan informasi tertentu yang penting diketahui oleh masyarakat, guna menjamin keterbukaan dan menjaga masyarakat tetap mendapat informasi yang relevan.

### **2.4 Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan program pemerintah yang menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang tinggal di wilayah desa (Kusnadi & Anwar, 2023). BLT DD merupakan dana desa yang dialihkan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Per bulannya, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp600.000. Bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 6

Tahun 2020. Dana desa direalokasikan menjadi BLT DD, dengan batasan berkisar antara 25% hingga 35% dari total dana desa yang dialokasikan (Fitriani et al., 2020).

Setelah melakukan evaluasi terhadap pencairan dana BLT DD tahap 1, Kementerian Keuangan merevisi peraturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Nomor 50/PMK.07/2020 dimana tidak ada batasan maksimal alokasi Dana Desa yang digunakan untuk BLT DD. Selain itu, bantuan BLT DD diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, dengan nilai tambahan sebesar Rp300.000 per bulan/rumah tangga. Peraturan baru ini juga memberikan relaksasi kepada pemerintah desa terkait persyaratan penyaluran dana desa.

#### **2.4.1 Dasar Hukum Pengelolaan BLT DD**

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas regulasi sebelumnya (Peraturan Menteri Desa PD TT, 2020b). Selain itu, Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa juga mengalami penyesuaian yang mencakup ketentuan mengenai penyediaan BLT Dana Desa (Peraturan Menteri Desa PD TT, 2019a).

#### **2.4.2 Tujuan BLT DD**

Tujuan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; BLT-DD bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan dasar.
2. Mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat tuntutan ekonomi; Dengan memberikan bantuan tunai, diharapkan dapat mencegah penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan.

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama; Program ini juga bertujuan untuk mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara masyarakat, sehingga mereka saling mendukung dalam menghadapi kesulitan.

BLT Dana Desa juga memegang bagian penting di tengah pemulihan perekonomian guna memberikan dukungan kepada masyarakat miskin yang terpengaruh oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan. Melalui bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk mengurangi beban yang mereka hadapi, terutama selama masa sulit akibat pandemi COVID-19.

## **2.5 Kinerja**

Kinerja adalah suatu keadaan di mana perlu memahami dan menkonfirmasi kepada pihak yang terkait guna mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari instansi tertentu, yang berkaitan dengan visi yang diusung oleh organisasi. Selain itu, kinerja bertujuan untuk menilai dampak positif dan negatif dari kebijakan yang telah diterapkan. Konsep kinerja dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kinerja individu (pegawai) dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja individu merujuk pada hasil yang dicapai oleh seorang pegawai dalam organisasi, sementara kinerja organisasi mencakup hasil total yang diperoleh oleh organisasi secara keseluruhan (Bora et al., 2024).

### **2.5.1 Kinerja keuangan**

Sistem pengukuran kinerja di sektor publik adalah sebuah alat yang dirancang untuk membantu para pemimpin dalam mengevaluasi sejauh mana keberhasilan strategi yang diterapkan, dengan menggunakan indikator yang mencakup baik aspek finansial maupun non-finansial. Dari sisi finansial, kinerja bisa diukur dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan hasil pelaksanaannya. Sementara itu, aspek non-finansial dinilai melalui efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian (Fazlurahman et al., 2020).

Kinerja keuangan pemerintah desa sendiri merujuk pada sejauh mana desa mampu menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan desa. Tujuan utamanya adalah agar desa bisa mandiri secara finansial, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, dan mampu mengelola keuangannya secara otonom sesuai dengan aturan yang berlaku. Penilaian terhadap kinerja keuangan desa dilakukan dengan menganalisis secara menyeluruh kondisi keuangan desa untuk melihat seberapa efektif pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Lestari et al., 2020).

### **2.5.2 Pengukuran Kinerja**

Tingkat pencapaian kinerja dalam suatu organisasi dapat diukur melalui pengembangan indikator kinerja yang efektif dalam mengidentifikasi variabel-variabel kunci di unit kerja (Magfiroh, 2020). Di era reformasi, kinerja telah menjadi komoditas yang sangat diminati, baik oleh praktisi maupun akademisi, yang berusaha menjelaskan apa yang dimaksud dengan kinerja, bagaimana ukuran kinerja, dan upaya untuk meningkatkannya (Ropi et al., 2021).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan di suatu organisasi adalah budaya organisasi. Budaya ini sangat dipengaruhi oleh peran dan komitmen para pemimpin serta sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut (Ropi et al., 2021). Berikut adalah beberapa aspek pengukuran dalam kinerja:

1. **Kualitas Kerja (Quality of Work):** Menilai seberapa baik hasil kerja yang dihasilkan oleh individu atau tim.
2. **Ketepatan (Promptness):** Mengukur seberapa tepat waktu suatu tugas atau proyek diselesaikan.
3. **Inisiatif (Initiative):** Menilai kemampuan individu untuk mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan.
4. **Kemampuan (Capability):** Mengukur keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugasnya.

5. Komunikasi (Communication): Menilai efektivitas komunikasi antara anggota tim dan dengan pihak lain dalam organisasi.

Aspek-aspek ini penting untuk dievaluasi agar organisasi dapat memahami dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Kualitas Kerja (Quality of Work).

### **2.5.3 Indikator Kinerja**

Indra Bastian (2001) dalam (Lestari et al., 2020) untuk menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai, diperlukan indikator kinerja yang mengacu pada beberapa elemen utama. Ada lima elemen indikator kinerja yang bisa digunakan, yaitu:

1. Indikator Masukan (Input): Merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan, seperti dana, tenaga kerja, dan informasi, yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu.
2. Indikator Keluaran (Output): Menggambarkan hasil langsung dari suatu kegiatan, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan.
3. Indikator Hasil (Outcome): Menunjukkan hasil yang dapat dirasakan atau diterima langsung oleh masyarakat atau pihak terkait dalam jangka menengah.
4. Indikator Manfaat (Benefit): Menjelaskan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari hasil kerja lembaga atau organisasi.
5. Indikator Dampak (Impact): Mengacu pada perubahan atau pengaruh yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan, seperti peningkatan taraf hidup atau pendapatan masyarakat.

### **2.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut karakteristik laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Sementara itu, PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa SPIP adalah suatu proses yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan

organisasi dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai.

Muraleetharan (2013) mencatat bahwa pengendalian internal adalah proses perubahan yang harus dilakukan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang jujur, dapat diandalkan akurat dan informatif secara berkala (Michael et al., 2020). Kegiatan pengendalian internal juga membantu mendorong efisiensi, meningkatkan keandalan, dan terkadang meminimalkan kehilangan aset (Mbulo et al., 2022). Selain itu, kekuatan sistem pengendalian internal suatu organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi inovasi (Freeman dan Engel, 2007) dalam (Hoai et al., 2022).

### **2.6.1 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari lima elemen yang saling terkait dan berinteraksi yaitu (Diansari et al., 2022):

1. Lingkungan pengendalian, meliputi upaya untuk menegakkan integritas serta nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian resiko, Proses ini dimulai dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya, instansi pemerintah mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal instansi. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi kemudian merumuskan pendekatan dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

3. Kegiatan pengendalian, mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah dijalankan dengan baik, guna mengurangi risiko yang telah diidentifikasi pada tahap penilaian risiko. Setiap instansi pemerintah dapat memiliki kegiatan pengendalian yang berbeda, yang dipengaruhi oleh variasi dalam visi, misi, tujuan, lingkungan operasional, tingkat kompleksitas organisasi, serta sejarah dan latar belakang masing-masing instansi.
4. Penyampaian informasi dan komunikasi, elemen ini sangat penting. Informasi yang relevan harus dapat diidentifikasi, dikumpulkan, dan disampaikan tepat waktu serta dalam format yang sesuai, agar setiap pihak yang terlibat dapat memahami tanggung jawabnya dengan jelas.
5. Pemantauan, yang dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti pengelolaan harian, supervisi, perbandingan data, rekonsiliasi, serta langkah-langkah lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, pemantauan juga mencakup evaluasi terpisah, yang dilakukan melalui penilaian mandiri, tinjauan menyeluruh, serta pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah maupun pihak eksternal, dengan menggunakan daftar uji pengendalian sebagai alat bantu.

### **2.6.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dirancang dengan tujuan untuk mencapai empat sasaran utama yang menjadi fokus dalam pengembangannya. Keempat tujuan tersebut meliputi:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Suatu instansi pemerintah dikatakan efisien jika mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi (pelayanan prima)

dengan menggunakan sumber daya (bahan baku) yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang bisa dipercaya. Tujuan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa informasi memiliki peranan krusial bagi instansi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada, informasi yang disajikan harus dapat diandalkan, yang berarti mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Laporan yang tidak akurat atau tidak memadai dapat menyesatkan dan berpotensi menyebabkan keputusan yang salah, yang pada akhirnya dapat merugikan organisasi.
3. Perlindungan terhadap aset negara. Aset milik negara diperoleh menggunakan dana publik, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan negara. Oleh sebab itu, menjaga keamanan aset negara menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Kelalaian dalam pengelolaan dan perlindungan aset dapat membuka peluang terjadinya pencurian, penggelapan, maupun manipulasi lainnya. Kerugian terhadap aset negara tidak hanya berdampak negatif pada instansi pemerintah, tetapi juga pada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik. Untuk mencegah hal tersebut, pengamanan aset dapat dilakukan melalui pengendalian yang mencakup pembatasan akses, pengelolaan data dan informasi secara tepat, serta penempatan petugas keamanan.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap aktivitas dan transaksi dalam lingkup pemerintahan merupakan bagian dari tindakan hukum. Oleh karena itu, semua tindakan harus dijalankan sesuai dengan kebijakan, rencana kerja, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, dan berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk tuntutan dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat.

Perlu diingat bahwa keempat tujuan SPIP ini tidak dimaksudkan untuk dicapai secara terpisah atau dirancang hanya untuk mengejar satu tujuan saja. Seluruh tujuan tersebut saling berkaitan dan harus dicapai secara terpadu.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuandari, 2020) yang membahas akuntabilitas dana desa dalam kerangka *good financial governance*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Penelitian ini menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus utama Wahyuandari adalah pada tata kelola keuangan yang baik, bukan hanya pada transparansi.

Kemudian oleh (Ambarwati & Wafiroh, 2024) mengkaji peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat desa memegang peran penting dalam menjamin pengelolaan dana desa yang akuntabel. Namun, mereka masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keterbatasan kapasitas dan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas. Penelitian ini menyarankan agar perangkat desa mendapatkan pelatihan yang lebih baik untuk memperkuat peran mereka. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada transparansi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini menekankan pada pengembangan kapasitas perangkat desa.

(Pratama, 2024) meneliti terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak dari perspektif akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan

dana. Dengan fokus yang lebih spesifik pada program BLT-DD, penelitian ini berbeda dari penelitian lain yang lebih umum membahas akuntabilitas dana desa.

(Kusnadi & Anwar, 2023) meneliti akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Padaasih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pelaporan dan transparansi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan evaluasi program. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Pratama dalam hal fokus pada BLT-DD, namun menekankan lebih pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas.

(Lazulfa, 2024) meneliti terkait transparansi penyaluran BLT-DD di Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga transparansi dalam penyaluran dana, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses tersebut, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan Putri et al., yang menyoroti tantangan selama pandemi, Lazulfa lebih fokus pada aspek lokal dan proses penyaluran dana di satu desa tertentu.

Selanjutnya, (Sudarmn, 2024) melakukan penelitian serupa mengenai transparansi penyaluran BLT-DD di Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme yang ditetapkan untuk menjaga transparansi, penerapannya masih kurang efektif. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya evaluasi berkala terhadap proses penyaluran dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Lazulfa dalam hal fokus pada transparansi, tetapi lebih mendalam dalam analisis mekanisme yang ada di desa yang berbeda.

(Adrianti et al., 2023) meneliti terkait bagaimana akuntabilitas dan transparansi memengaruhi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Gowa, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan dana. Selain itu, sistem pengendalian internal terbukti memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan pengelolaan dana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek transparansi, studi ini memberikan kontribusi dengan menyoroti keterkaitan antara akuntabilitas, transparansi, dan peran sistem pengendalian internal sebagai penguat hubungan di antara ketiganya.

Kemudian (Martadinata & Safitri, 2024) meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan BLT-DD di Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, masih ada beberapa tantangan dalam hal pelaporan dan transparansi yang perlu diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pelatihan bagi perangkat desa untuk memahami pentingnya akuntabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Adrianti et al. dalam hal fokus pada akuntabilitas, namun lebih menekankan pada praktik di tingkat desa.

(Radeana et al., 2024) mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT dalam konteks pencapaian *good governance*. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang baik berkontribusi positif terhadap pencapaian prinsip-prinsip *good governance*. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, mengaitkan akuntabilitas dan transparansi dengan tujuan yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan.

(Mohammed et al., 2023) dalam *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research* (2023) mengevaluasi pengaruh regulasi keuangan terhadap akuntabilitas di NIMC dan NASRDA Nigeria periode 2008-2017. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan ketat pada prosedur audit internal dan penerapan sanksi yang tegas meningkatkan akuntabilitas, terutama di NIMC, tetapi di NASRDA, rendahnya kepatuhan dan lemahnya penegakan sanksi menghambat akuntabilitas, dipengaruhi

oleh sikap pejabat publik dan sistem kontrol internal yang lemah. Saran yang diberikan mencakup penyusunan jadwal audit rutin, pelaporan cepat terhadap penyimpangan, penguatan mekanisme kontrol internal, dan penerapan sanksi yang lebih keras untuk mendorong akuntabilitas yang lebih baik di sektor publik Nigeria.

(Daud et al., 2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Bireuen. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas dalam pengelolaan dana. Selain itu juga, peningkatan transparansi turut mendorong meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa. Berbeda dari penelitian lain, fokus utama Daud et al. adalah pada hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana.

(Winarti & Priyastiwi, 2023) mengevaluasi penyaluran program BLT-DD di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program BLT-DD telah dilaksanakan, terdapat beberapa masalah dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyaluran. Penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi pelaksanaan program di tingkat desa.

(Nagriwum et al., 2023) meneliti aspek transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Ghana, khususnya pada Sunyani West Municipal Assembly. Temuan mereka menunjukkan bahwa rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penghambat dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu berfokus pada pengelolaan keuangan pemerintah lokal di negara lain.

(Samuel & Rufus, 2024) mengkaji masalah transparansi dan akuntabilitas di sektor publik Nigeria. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat mengakibatkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan sektor publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Fokus tersebut sejalan dengan temuan Nagriwum et al., meskipun konteks yang dikaji berbeda, yakni pada negara yang berbeda. Kedua studi sama-sama menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarto, 2024) mengkaji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan di wilayah Sulawesi Selatan. Temuan dari studi ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara efektivitas sistem pengendalian intern dengan tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Sementara itu, (Mattoasi et al., 2021) meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, dengan koefisien determinasi sebesar 48,7%. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan SPIP yang optimal untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mencatat adanya kendala dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan seperti partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi, dan kualitas sumber daya manusia.

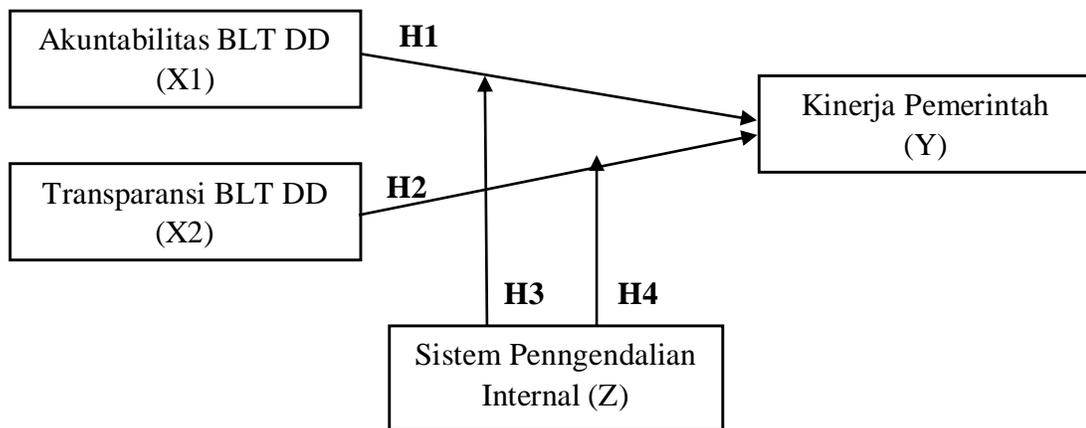
Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengelola dana desa dengan baik, perlu untuk menggabungkan beberapa elemen penting. Pertama, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas utama. Selain

itu, peningkatan kapasitas perangkat desa sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Keterlibatan masyarakat juga tidak kalah penting, karena partisipasi mereka dapat meningkatkan pengawasan dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana.

## 2.8 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2022:95) kerangka pikir merupakan landasan atau dasar konseptual yang digunakan untuk memberikan arahan dalam penelitian agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, kerangka pikir disusun sebagaimana dijelaskan berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## 2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Istilah "sementara" menunjukkan bahwa jawaban tersebut bersifat dugaan awal yang didasarkan pada teori-teori yang relevan, sebelum akhirnya dibuktikan melalui data yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi di lapangan (Sugiyono, 2019). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Pengaruh Akuntabilitas Pada Pengelolaan BLT DD Terhadap Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan penggunaan dana serta sumber daya lainnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan akuntabilitas yang baik juga berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BLT DD, karena pemerintah desa dapat lebih optimal dalam memantau dan mengendalikan penggunaan dana serta sumber daya (Khan et al., 2023).

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi melalui laporan yang disampaikan secara berkala. Definisi ini berkaitan erat dengan kinerja, di mana reformasi birokrasi telah menggeser fokus dari hasil kerja (output) ke kinerja (outcome). Tujuan utama dari perubahan ini adalah menciptakan birokrasi yang efisien dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas (Ahyaruddin et al., 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, (Khan et al., 2023) menemukan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian oleh (M. Daud et al., 2022) mengindikasikan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan BLT-DD dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pihak pengelola dapat mempertanggungjawabkan setiap aspek penggunaan dana, kepercayaan publik akan meningkat, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** diduga bahwa akuntabilitas pengelolaan BLT DD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

## **2. Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan BLT DD Terhadap Kinerja Pemerintah**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara lengkap mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Prinsip ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi terkait proses penyaluran bantuan (Fadhilla & Irham, 2024). Selain itu, penerapan transparansi turut mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BLT DD, karena pemerintah desa dapat lebih optimal dalam memantau dan mengendalikan penggunaan dana serta sumber daya lainnya (Khan et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, temuan dari (M. Daud et al., 2022) mengindikasikan bahwa transparansi berperan penting dan berdampak positif secara signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD, karena memungkinkan pengawasan yang lebih mudah oleh masyarakat dan pihak terkait, sehingga meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, penelitian (Khan et al., 2023) juga menyatakan bahwa transparansi berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, (G. Sari, 2022) menemukan bahwa transparansi mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan BLT-DD. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2: :** diduga bahwa transparansi pengelolaan BLT DD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

## **3. Pengaruh akuntabilitas Pengelolaan BLT DD terhadap kinerja pemerintah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi**

Akuntabilitas dalam pengelolaan BLT DD dapat meningkatkan kinerja pemerintah, karena pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan sumber daya lainnya dengan lebih baik. Namun, hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah dapat diperkuat melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang dirancang dengan baik

mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam BLT DD, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah (Khan et al., 2023).

Penelitian terdahulu oleh (Melasari et al., 2023) menyatakan bahwa pengendalian internal dan akuntabilitas merupakan dua komponen yang secara signifikan memengaruhi kinerja organisasi sektor publik, khususnya OPD. Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan bahwa operasional pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian dari (Faturahman, 2020) juga mengindikasikan bahwa pengendalian internal dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Pengendalian internal lebih kuat pengaruhnya secara tidak langsung melalui variabel lain terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan kompetensi pegawai lebih dominan memberikan pengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3:** diduga bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas pengelolaan BLT DD terhadap kinerja pemerintah.

#### **4. Pengaruh transparansi Pengelolaan BLT DD terhadap kinerja pemerintah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi**

Hubungan antara transparansi dan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Artinya, ketika transparansi pemerintah meningkat, kinerja pemerintah juga cenderung meningkat, terutama jika didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal yang baik berfungsi untuk memperkuat hubungan antara transparansi dan kinerja, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan kata lain, transparansi yang tinggi, yang ditunjukkan melalui ketersediaan informasi yang jelas dan akurat, akan lebih berdampak positif terhadap kinerja pemerintah jika didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat (Adrianti et al., 2023).

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya oleh (Felina Kusuma, 2021) mengindikasikan bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja

pemerintah karena memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, pengendalian internal yang efektif mendukung terciptanya tata kelola yang terukur dan akuntabel, sehingga turut meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian dari (S. P. Sari & Fuadi, 2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan transparansi berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penerapan SPIP yang tepat serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Selain itu, kinerja pemerintah dapat terus ditingkatkan apabila manajemen birokrasi mampu menjalankan kebijakan secara terbuka dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H4:** diduga bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara transparansi pengelolaan BLT DD terhadap kinerja pemerintah.

## **2.10 Research GAP**

Celah penelitian (*research gap*) adalah kondisi di mana suatu area atau topik penelitian belum pernah atau masih sedikit dieksplorasi oleh penulis jurnal ilmiah. Celah ini biasanya muncul karena ada aspek yang terlewat dalam penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, celah penelitian adalah kekosongan yang muncul dari hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya (Hanifah et al., 2022).

Berbagai studi sebelumnya telah membahas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai, namun masih terdapat sejumlah kekosongan penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji dan perlu ditelusuri lebih mendalam. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah adanya keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menyalurkan BLT

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti tantangan ini. Misalnya, penelitian oleh (Pratama, 2024) yang meneliti akuntabilitas pelaksanaan BLT-DD di Desa Titian Resak menemukan bahwa meskipun program ini berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Ambarwati & Wafiroh, 2024) menekankan pentingnya kontribusi aparat desa dalam menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, tetapi menemukan bahwa pemahaman dan kapasitas perangkat desa masih menjadi kendala utama. Sementara itu, (Wahyuandari, 2020) mengkaji akuntabilitas dana desa dalam konteks good financial governance dan menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan yang menghambat tercapainya tata kelola keuangan yang baik.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami permasalahan transparansi dan akuntabilitas BLT-DD, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana sistem pengendalian internal dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah desa. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana sistem pengendalian internal dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang ada.

Selain itu, penelitian mengenai BLT-DD juga cenderung melihat aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum, tetapi belum banyak yang secara spesifik mengkaji dampak dari pengurangan jumlah penerima BLT-DD terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, di Kampung Sekban, Kabupaten Fakfak, jumlah penerima BLT-DD mengalami pengurangan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip akuntabilitas

dan transparansi secara optimal, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan.

Mengacu pada kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran sistem pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLT-DD serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di sejumlah desa. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif guna mendorong pengelolaan BLT-DD yang lebih transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif berpijak pada paradigma positivistik, yang menekankan objektivitas dan digunakan untuk meneliti populasi maupun sampel secara sistematis. Ciri khas dari pendekatan ini adalah penggunaan data dalam bentuk angka yang dikumpulkan dan dianalisis guna memperoleh informasi yang akurat dan terukur. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai variabel-variabel yang diteliti dan bagaimana interaksi antar variabel tersebut dalam konteks yang lebih luas (Jailani, 2023).

**3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

**3.2.1 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

**Tabel 3.1 Rencana Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		2024			2025				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Observasi Awal	■	■						
2	Penyusunan Proposal		■	■	■				
3	Bimbingan		■	■	■	■	■	■	■
4	Seminar Proposal				■				
5	Penelitian di lapangan					■	■		
6	Analisis Data						■	■	
7	Sidang Skripsi								■
8	Revisi							■	■

### **3.2.2 Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak.

## **3.3 Populasi dan Sampel/Subjek/Fokus**

### **3.3.1 Populasi**

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), populasi merujuk pada keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian dan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berdomisili di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Berdasarkan data distribusi bantuan pada tahun 2024, jumlah individu yang terdaftar sebagai penerima BLT-DD di daerah tersebut mencapai 50 orang.

### **3.3.2 Sampel**

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri khusus dan dipilih sebagai representasi untuk mewakili keseluruhan populasi dalam proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, ukuran sampel yang layak digunakan umumnya berkisar antara 30 hingga 500 responden. Jika sampel diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, maka jumlah minimal yang direkomendasikan adalah sebesar 30% dari jumlah populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel non-probabilitas dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengacu pada penilaian subjektif peneliti dalam memilih individu yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan studi. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang masih tercatat aktif sebagai penerima BLT DD dan belum pernah dikeluarkan dari daftar penerima di Kampung Sekban.

Untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menerapkan rumus Slovin sebagai pendekatan matematis guna menentukan ukuran sampel secara rasional. Rumus ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif ketika seluruh data populasi diketahui dan peneliti ingin memperoleh sampel yang mewakili dengan tingkat presisi tertentu. Dengan jumlah populasi sebanyak 50 orang penerima BLT di Kampung Sekban, peneliti menghitung ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = N / ( 1 + N \cdot e^2 )$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = margin error yang diperkenankan / taraf signifikansi (1% atau 5%)

Substitusi ke rumus slovin

Diketahui :

$$N = 50, e = 0,5 \text{ (atau 5\%)}$$

$$n = 50 / ( 1 + 50 \times 0.05^2 )$$

$$n = 44.44 \text{ orang (dibulatkan menjadi 44)}$$

Berdasarkan hasil substitusi nilai-nilai ke dalam rumus Slovin, diperoleh bahwa jumlah sampel (n) yang sesuai untuk penelitian ini adalah sebanyak 44 responden. Dengan demikian, instrumen penelitian berupa kuesioner akan disebarkan kepada 44 individu yang secara resmi terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Jumlah ini dianggap memadai untuk merepresentasikan seluruh populasi dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Metode observasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi, aktivitas, atau perilaku subjek yang menjadi objek kajian. Pengamatan ini dilakukan di lokasi yang sesuai dengan konteks penelitian, dan seluruh temuan dicatat secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut (Bora et al., 2024).

#### 2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang terdiri atas sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dirancang untuk dijawab oleh responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari partisipan penelitian mengenai sikap, persepsi, atau pengalaman mereka terhadap suatu isu tertentu (Sugiyono, 2019).

**Tabel 3.2 Klasifikasi Jawaban Skala Likert**

Pernyataan	
Jawaban	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (ST)	4
Kurang Setujua (KS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

*Sumber: Sugiyono (2019)*

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang diperoleh berasal dari dokumen resmi, arsip, laporan, surat,

catatan administratif, buku, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan fenomena yang dikaji (Jailani, 2023).

#### **4. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah metode yang digunakan untuk mengkaji berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti (Teguh et al., 2023).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan gambaran data melalui analisis sejumlah nilai seperti mean, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, serta skewness (Fahreza et al., 2022).

Analisis ini diterapkan pada variabel-variabel penelitian, yakni variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah dan variabel independen yang meliputi Akuntabilitas, Transparansi, serta Sistem Pengendalian Internal. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel menggunakan program SPSS. Selain itu, statistik deskriptif juga menyertakan informasi karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, jabatan, dan tingkat pendidikan.

#### **3.5.2 Uji kualitas data**

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Suatu kuesioner dianggap reliabel apabila menghasilkan jawaban yang konsisten dari responden ketika pertanyaan yang sama diajukan pada waktu yang berbeda. Untuk memastikan bahwa kuesioner sebagai indikator variabel memiliki reliabilitas yang baik, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas (Fahreza et al., 2022).

## 1. Uji validitas

Uji validitas adalah metode untuk menilai sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur hal yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat validitas, semakin akurat instrumen tersebut dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Pengujian ini penting agar setiap pernyataan mencerminkan variabel yang diteliti dengan akurat. Validitas diuji terhadap item yang disusun berdasarkan operasionalisasi variabel dan indikatornya. Item dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diketahui.

Uji dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka item tersebut valid karena berkorelasi signifikan dengan skor total. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka item dinyatakan tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen pengukuran mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Suatu alat ukur dianggap reliabel apabila memberikan hasil yang stabil saat digunakan berulang kali dalam situasi yang serupa. Kuesioner dinyatakan reliabel jika respons yang diberikan oleh responden tetap konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas diuji dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel. Suatu instrumen dianggap reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,70.

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda, yaitu salah satu metode statistik yang lazim digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Model ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (X) memengaruhi variabel terikat (Y), baik secara parsial maupun simultan.

Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus memahami pola interaksi antarvariabel dalam konteks yang diteliti. Regresi linier berganda memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antarvariabel dalam model penelitian (Fahreza et al., 2022). Berikut susunan persamaan analisis regresi linier:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Pemerintah
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Akuntabilitas BLT DD
- $X_2$  : Transparansi BLT DD
- Z : Standar Pengendalian Internal
- $\varepsilon$  : Standar *error*

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada dalam rentang 0 hingga 1. Jika nilainya rendah, berarti variabel independen hanya sedikit menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Secara umum, nilai  $R^2$  dalam data cross-section cenderung lebih rendah dibandingkan dengan data time series (Fahreza et al., 2022).

## 3. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Ghozali (2018) menyebutkan bahwa jika nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan dan dapat memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai tersebut lebih dari 0,05, maka model dianggap tidak signifikan.

#### **4. Uji Parsial (T)**

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji t bertujuan mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah tiap variabel bebas memberikan pengaruh signifikan. Jika nilai signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen tersebut dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kampung Sekban, terletak di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, memiliki karakteristik topografi dataran rendah dengan ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kampung hanya sekitar 2 hektar, yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemukiman warga serta fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, dan balai pertemuan. Infrastruktur jalan meliputi jalan kabupaten sepanjang 1 km dengan kondisi beraspal, serta jalan setapak dan gang sepanjang 1.500 meter yang sebagian besar telah dibeton atau dipaving melalui anggaran kampung dan kabupaten.

Perekonomian Kampung Sekban bertumpu pada kegiatan swadaya masyarakat, dengan sektor utama meliputi industri rumah tangga seperti pembuatan manisan pala, pertanian hidroponik, perikanan, dan perdagangan asongan. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Sekban berperan penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan modal usaha. Keberadaan kelompok tani, nelayan, dan pedagang menunjukkan potensi ekonomi lokal yang beragam, meskipun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing.

Selain itu, semangat gotong royong masyarakat menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur kampung. Secara sosial, Kampung Sekban memiliki kehidupan budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Kabupaten Fakfak, terutama konsep “Satu Tungku Tiga Batu” yang menekankan harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Kelembagaan kampung cukup lengkap, mencakup pemerintahan kampung, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), PKK, Karang Taruna, Linmas, serta kelompok keagamaan seperti TPQ dan Ikatan Remaja Masjid. Wilayah ini terbagi

menjadi lima Rukun Tetangga (RT), masing-masing dipimpin oleh ketua RT yang aktif dalam koordinasi kegiatan masyarakat.

#### **4.1.1 Visi Misi Desa Sekban**

Visi Kampung Sekban adalah "Membangun Kampung Sekban yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia". Visi ini mencerminkan cita-cita untuk membangun masyarakat yang demokratis, transparan, harmonis, netral, sejahtera, serta menjaga budaya dan nilai-nilai lokal. Misi Kampung Sekban meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi kreatif dan inovatif, pemanfaatan sumber daya alam secara cerdas, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.

#### **4.1.2 Letak Geografis**

Kampung Sekban berada di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, dengan luas wilayah sekitar 2 hektar. Secara topografi, kampung ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 200 hingga 300m di atas permukaan laut. Kampung ini berbatasan dengan Kelurahan Dulanpokpok di utara dan timur, Laut Seram di selatan, serta Kampung Torea di barat. Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 1 km yang beraspal, serta jalan setapak dan gang yang sebagian besar telah dibeton atau dipaving.

#### **4.1.3 Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kampung Sekban pada Maret 2022 adalah 1.041 jiwa, terdiri dari 519 laki-laki dan 522 perempuan, dengan total 302 kepala keluarga. Penduduk kampung ini tersebar di lima RT dengan mayoritas mata pencaharian sebagai buruh, nelayan, pedagang, petani, serta pekerja di sektor jasa. Mayoritas penduduk menganut agama Islam (951 orang), diikuti Katolik (70 orang) dan Protestan (20 orang). Kebudayaan lokal masih sangat kental dengan konsep "Satu Tungku Tiga Batu" yang merepresentasikan keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan.

## 4.2 Deskripsi Responden Penerima Bantuan Langsung Tunai

Melalui program ini, bantuan dari pemerintah tidak diberikan secara cuma-cuma. Penerima BLT diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi. Adapun informan dalam penelitian ini merupakan warga Desa Sekban, Kabupaten Fakfak.

### 4.2.1 Deskripai Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki-laki	21	52,3%
Perempuan	23	47,7%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan tabel 4.1 Dapat diketahui bahwa jumlah informan perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Proposi ini menunjukkan bahwa distribusi gender dalam survei cukup seimbang.

### 4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Status Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Petani	3	6,82%
Nelayan	8	18,18%
Buruh	1	2,27%
Sopir	2	4,55%
Ojek	1	2,27%
Pelajar	3	6,82%
Karyawan Swasta	1	2,27%
Honorar	1	2,27%
Tidak Bekerja	24	54,55%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Data dari tabel 4.2 tersebut menunjukkan data tentang jenis pekerjaan dari 44 responden dimana mayoritas, yaitu 24 orang atau 54,55% tidak bekerja. Di sisi lain,

kategori pekerjaan yang paling dominan di antara yang bekerja adalah nelayan, dengan jumlah 8 orang atau 18,18% dari total responden. Ini menandakan bahwa aktivitas perikanan menjadi salah satu mata pencaharian utama di komunitas ini.

Lalu, diikuti oleh petani dengan jumlah 3 orang atau 6,82%, yang mengindikasikan bahwa pertanian juga memainkan peran, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan nelayan. Pekerjaan lain seperti buruh (2,27%), sopir (4,55%), ojek (2,27%), pelajar (6,82%), honorer (2,27%) dan karyawan swasta (2,27%) memiliki kontribusi yang relatif kecil, menunjukkan diversifikasi pekerjaan yang terbatas.

#### 4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Presentase (%)</b>
20	1	2,3%
32	1	2,3%
41	1	2,3%
49	2	4,5%
56	2	4,5%
60	3	6,8%
63	3	6,8%
68	3	6,8%
71	1	2,3%
75	1	2,3%
79	2	4,5%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Data ini menggambarkan sebaran usia dari 44 responden. Usia responden bervariasi dari 20 hingga 79 tahun, dengan mayoritas berada di rentang usia 50-70 tahun. Kelompok usia yang paling banyak diisi adalah sekitar 60, 63, dan 68 tahun, masing-masing dengan 3 responden (6,8%). Beberapa usia lainnya memiliki 1 atau 2 responden. Dari distribusi ini, terlihat bahwa mayoritas responden adalah kelompok usia paruh baya hingga lanjut usia.

### 4.3 Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel-Variabel Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman terhadap respons responden atas variabel-variabel yang diteliti, dilakukan analisis terhadap jawaban atas pernyataan yang diajukan. Terdapat total 47 butir pernyataan, terdiri dari 10 item untuk variabel X1, 9 item untuk X2, 15 item untuk variabel Z, dan 13 item untuk variabel Y. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi rata-rata dari setiap dimensi serta menghitung rata-rata keseluruhan. Kategori penentuan tanggapan responden terhadap variabel penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sangat setuju (SS) = 5
- 2) Setuju (ST) = 4
- 3) Kurang Setuju (KS) = 3
- 4) Tidak setuju (TS) = 2
- 5) Sangat tidak setuju (STS) = 1

Penilaian dilakukan berdasarkan rata-rata setiap pernyataan, dengan rentang nilai dari 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi). Dengan demikian, interval dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}(p) &= r/k \\ &= (5-1) / 5 \\ &= 5 / 4 \\ &= 0.8\end{aligned}$$

Keterangan :

p : Interval Kelas

r : Rentang

k : Kriteria

Skor untuk setiap item pernyataan diperoleh melalui analisis indeks, yang ditentukan berdasarkan kategori nilai interval berikut:

**Tabel 4.4 Kelas Interval Kategori**

No.	Keterangan	Bobot Skor
1.	Sangat tidak setuju (STS)	1,00 – 1,80
2.	Tidak Setuju (TS)	1,81 – 2,60

No.	Keterangan	Bobot Skor
3.	Kurang Setuju (KS)	2,61 – 3,40
4.	Setuju (ST)	3,41 – 4,20
5.	Sangat Setuju (SS)	4,21 – 5,00

#### 4.3.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif Pernyataan

##### 1. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X1)

Analisis deskriptif terhadap variabel akuntabilitas dilakukan berdasarkan tanggapan responden atas pernyataan dalam kuesioner yang telah dibagikan. Tabel 4.5 di bawah ini menyajikan distribusi jawaban responden terkait variabel akuntabilitas.

**Tabel 4.5 Deskripsi Item Pernyataan Variabel X1**

No	Akuntabilitas	N	Rata-Rata	Kategori
X1.1	Saya merasa petugas penyalur BLT bertindak dengan jujur dan tidak memihak.	44	4.23	Setuju (ST)
X1.2	Tidak ada penyelewengan dana BLT yang saya ketahui dalam penyalurannya.	44	4.25	Setuju (ST)
X1.3	Proses penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.	44	4.21	Setuju (ST)
X1.4	Saya merasa data penerima BLT diproses dengan adil dan transparan.	44	4.26	Setuju (ST)
X1.5	Semua tahapan penyaluran BLT dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah desa.	44	3.12	Kurang Setuju (KS)
X1.6	Program BLT ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	44	4.38	Sangat Setuju (SS)
X1.7	Penyaluran BLT dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.	44	4.21	Setuju (ST)

No	Akuntabilitas	N	Rata-Rata	Kategori
X1.8	Saya merasa program BLT ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa.	44	4.28	Setuju (SS)
X1.9	Kebijakan mengenai penerimaan BLT sudah disosialisasikan kepada masyarakat.	44	4.29	Setuju (ST)
X1.10	Saya merasa kebijakan BLT ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	44	4.24	Setuju (ST)

*Sumber Data Diolah (2025)*

Berdasarkan data tersebut, skor tertinggi ditemukan pada pernyataan keenam dengan nilai 4,38, sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan kelima dengan nilai 3,12. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden sangat setuju bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## 2. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel transparansi didasarkan pada respons yang diberikan oleh para responden atas pernyataan dalam kuesioner yang telah disebar. Tabel 4.6 berikut menyajikan distribusi jawaban responden terhadap variabel transparansi.

**Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel X2**

No	Transparansi	N	Rata-Rata	Kategori
X2.1	Informasi terkait BLT tidak pernah berubah secara mendadak tanpa pemberitahuan	44	4.20	Setuju (ST)
X2.2	Prosedur untuk menerima BLT dijelaskan secara rinci oleh pemerintah desa.	44	4.27	Setuju (ST)
X2.3	Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan dalam proses penerimaan BLT.	44	4.29	Setuju (ST)

No	Transparansi	N	Rata-Rata	Kategori
X2.4	Saya merasa informasi terkait kriteria dan syarat penerimaan BLT mudah dipahami.	44	4.29	Setuju (ST)
X2.5	Saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BLT dari pemerintah desa.	44	4.20	Setuju (ST)
X2.6	Pemerintah desa menggunakan berbagai cara (misalnya, papan pengumuman, media sosial, atau rapat) untuk menyampaikan informasi terkait BLT.	44	3,42	Setuju (ST)
X2.7	Informasi terkait BLT tersedia dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan.	44	4.27	Setuju (ST)
X2.8	Pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah terkait BLT.	44	2,71	Kurang Setuju (KS)
X2.9	Saya mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran BLT	44	2.70	Kurang Setuju (KS)

*Sumber Data Diolah (2025)*

Berdasarkan data tersebut, pernyataan pertama memperoleh skor tertinggi sebesar 4,29, sementara skor terendah tercatat pada pernyataan kesembilan dengan nilai 2,70. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa transparansi berkontribusi positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT Dana Desa.

### **3. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (Z)**

Analisis deskriptif terhadap variabel sistem pengendalian internal didasarkan pada tanggapan responden terhadap butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang telah disebar. Tabel 4.7 berikut menyajikan distribusi jawaban responden terkait variable sistem pengendalian internal.

**Tabel 4.7 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Z**

<b>No</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>N</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kategori</b>
Z1	Pemerintah desa memiliki aturan yang jelas dalam menyalurkan BLT	44	4.21	Setuju (ST)
Z2	Petugas penyalur BLT bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	44	4.22	Setuju (ST)
Z3	Saya merasa pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan BLT disalurkan dengan baik	44	4.24	Setuju (ST)
Z4	Pemerintah desa memastikan penerima BLT benar-benar sesuai dengan kriteria	44	4.26	Setuju (ST)
Z5	Resiko kesalahan dalam penyaluran BLT sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah	44	3.90	Setuju (ST)
Z6	Pemerintah desa mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BLT	44	4.12	Setuju (ST)
Z7	Proses penyaluran BLT dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal	44	3.89	Setuju (ST)
Z8	Pemerintah selalu memverifikasi data penerima BLT sebelum penyaluran	44	4.18	Setuju (ST)
Z9	Saya merasa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran BLT di desa saya	44	4.23	Setuju (ST)
Z10	Informasi terkait jadwal dan tata cara penyaluran BLT diberikan dengan jelas kepada masyarakat	44	4.19	Setuju (ST)
Z11	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait BLT secara terbuka dan jelas	44	3.92	Setuju (ST)
Z12	Saya selalu mendapatkan pemberitahuan terkait BLT melalui media atau petugas desa	44	3.56	Setuju (ST)

No	Sistem Pengendalian Internal	N	Rata-Rata	Kategori
Z13	Pemerintah desa aktif memantau proses penyaluran BLT untuk memastikan berjalan sesuai aturan	44	3.68	Setuju (ST)
Z14	Ada tindak lanjut dari pemerintah jika terjadi kesalahan atau masalah dalam penyaluran BLT	44	3.90	Setuju (ST)
Z15	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT	44	4.28	Setuju (ST)

*Sumber Data Diolah (2025)*

Berdasarkan data yang disajikan, pernyataan kelima belas mencatat skor tertinggi sebesar 4,28, sementara skor terendah ditemukan pada pernyataan kedubelas dengan nilai 3,56. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa sistem pengendalian internal berperan positif dan signifikan dalam mendukung pengelolaan BLT Dana Desa.

#### **4. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Kinerja Pemerintah (Y)**

Analisis deskriptif terhadap variabel kinerja pemerintah didasarkan pada tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang telah disebar. Tabel 4.8 berikut menyajikan distribusi jawaban responden untuk variabel kinerja pemerintah.

**Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Y**

No	Kinerja Pemerintah	N	Rata-Rata	Kategori
Y.1	Data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan	44	4.12	Setuju (ST)
Y.2	Saya merasa pemerintah memiliki persiapan yang baik sebelum menyalurkan BLT	44	3.89	Setuju (ST)
Y.3	Proses pendaftaran penerima BLT dilakukan dengan jelas dan terbuka	44	4.18	Setuju (ST)
Y.4	Saya merasa BLT tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	44	4.23	Setuju (ST)

No	Kinerja Pemerintah	N	Rata-Rata	Kategori
Y.5	Jumlah BLT yang saya terima sesuai dengan informasi yang diberikan	44	4.19	Setuju (ST)
Y.6	Proses pencairan BLT dilakukan dengan mudah dan tidak rumit	44	3.92	Setuju (ST)
Y.7	BLT yang saya terima membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	44	4.26	Setuju (ST)
Y.8	Program BLT mengurangi beban ekonomi saya dan keluarga	44	4.26	Setuju (ST)
Y.9	Saya merasa puas dengan pelaksanaan program BLT yang dilakukan oleh Pemerintah	44	4.26	Setuju (ST)
Y.10	Bantuan ini membantu saya mengatasi kesulitan di masa mendesak	44	3.82	Setuju (ST)
Y.11	Program BLT membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat	44	3.90	Setuju (ST)
Y.12	Saya merasa lebih percaya pada pemerintah setelah menerima BLT ini	44	4.21	Setuju (ST)
Y.13	Program BLT ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Desa saya	44	4.28	Setuju (ST)

*Sumber Data Diolah (2025)*

Dari data di atas, skor tertinggi diperoleh dari pernyataan ke tigabelas (4,28), sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan sepuluh (3,82). Secara keseluruhan, skor tersebut menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa kinerja pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

#### **4.4 Hasil Uji Kualitas Data**

##### **4.4.1 Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan, dengan kuesioner sebagai alat

ukurannya. Agar hasil penelitian memiliki kualitas yang baik, seluruh tahapan penelitian harus dilakukan secara teliti. Tujuan utama uji validitas adalah menilai sejauh mana instrumen yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Situmorang (2014:89) menyatakan bahwa suatu item dikategorikan valid jika nilai koefisien korelasi ( $r$  hitung) lebih besar dari  $r$  tabel (0,297). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan sebelum analisis lanjutan, dengan menyebarkan kuesioner kepada 44 penerima BLT Dana Desa di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.0 dengan kriteria berikut:

1. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka item dinyatakan valid.
2. Jika  $r$  hitung kurang dari  $r$  tabel, maka item dinyatakan tidak valid.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner valid, karena masing-masing memperoleh nilai  $r$  hitung yang melebihi  $r$  tabel, serta memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000, yang berada di bawah batas signifikansi 0.05.

**Tabel 4.9 Pengujian Validitas Variabel (X1)**

No	Akuntabilitas	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
X1.1	Saya merasa petugas penyalur BLT bertindak dengan jujur dan tidak memihak.	0.508	0.297	Valid
X1.2	Tidak ada penyelewengan dana BLT yang saya ketahui dalam penyalurannya.	0.302	0.297	Valid
X1.3	Proses penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.	0.568	0.297	Valid
X1.4	Saya merasa data penerima BLT diproses dengan adil dan transparan.	0.544	0.297	Valid
X1.5	Semua tahapan penyaluran BLT dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah desa.	0.458	0.297	Valid
X1.6	Program BLT ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	0.302	0.297	Valid

No	Akuntabilitas	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
X1.7	Penyaluran BLT dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.	0.418	0.297	Valid
X1.8	Saya merasa program BLT ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa.	0.402	0.297	Valid
X1.9	Kebijakan mengenai penerimaan BLT sudah disosialisasikan kepada masyarakat.	0.570	0.297	Valid
X1.10	Saya merasa kebijakan BLT ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	0.401	0.297	Valid

*Sumber Data Diolah (2025)*

**Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Variabel (X2)**

No	Transparansi	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
X2.1	Informasi terkait BLT tidak pernah berubah secara mendadak tanpa pemberitahuan	0.417	0.297	Valid
X2.2	Prosedur untuk menerima BLT dijelaskan secara rinci oleh pemerintah desa.	0.432	0.297	Valid
X2.3	Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan dalam proses penerimaan BLT.	0.570	0.297	Valid
X2.4	Saya merasa informasi terkait kriteria dan syarat penerimaan BLT mudah dipahami.	0.418	0.297	Valid
X2.5	Saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BLT dari pemerintah desa.	0.442	0.297	Valid
X2.6	Pemerintah desa menggunakan berbagai cara (misalnya, papan pengumuman, media sosial, atau rapat) untuk menyampaikan informasi terkait BLT.	0.432	0.297	Valid
X2.7	Informasi terkait BLT tersedia dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan.	0.412	0.297	Valid

No	Transparansi	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
X2.8	Pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah terkait BLT.	0.422	0.297	Valid
X2.9	Saya mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran BLT	0.460	0.297	Valid

*Sumber Data Diolah (2025)*

**Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Variabel (Z)**

No	Sistem Pengendalian Internal	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Z1	Pemerintah desa memiliki aturan yang jelas dalam menyalurkan BLT	0.318	0.297	Valid
Z2	Petugas penyalur BLT bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	0.423	0.297	Valid
Z3	Saya merasa pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan BLT disalurkan dengan baik	0.445	0.297	Valid
Z4	Pemerintah desa memastikan penerima BLT benar-benar sesuai dengan kriteria	0.423	0.297	Valid
Z5	Resiko kesalahan dalam penyaluran BLT sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah	0.542	0.297	Valid
Z6	Pemerintah desa mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BLT	0.432	0.297	Valid
Z7	Proses penyaluran BLT dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal	0.312	0.297	Valid
Z8	Pemerintah selalu memverifikasi data penerima BLT sebelum penyaluran	0.372	0.297	Valid
Z9	Saya merasa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran BLT di desa saya	0.430	0.297	Valid
Z10	Informasi terkait jadwal dan tata cara penyaluran BLT diberikan dengan jelas kepada masyarakat	0.337	0.297	Valid
Z11	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait BLT secara terbuka dan jelas	0.352	0.297	Valid

No	Sistem Pengendalian Internal	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Z12	Saya selalu mendapatkan pemberitahuan terkait BLT melalui media atau petugas desa	0.420	0.297	Valid
Z13	Pemerintah desa aktif memantau proses penyaluran BLT untuk memastikan berjalan sesuai aturan	0.568	0.297	Valid
Z14	Ada tindak lanjut dari pemerintah jika terjadi kesalahan atau masalah dalam penyaluran BLT	0.452	0.297	Valid
Z15	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT	0.412	0.297	Valid

*Sumber Data Diolah (2025)*

**Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Variabel (Y)**

No	Kinerja Pemerintah	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Y.1	Data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan	0.370	0.297	Valid
Y.2	Saya merasa pemerintah memiliki persiapan yang baik sebelum menyalurkan BLT	0.348	0.297	Valid
Y.3	Proses pendaftaran penerima BLT dilakukan dengan jelas dan terbuka	0.442	0.297	Valid
Y.4	Saya merasa BLT tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	0.442	0.297	Valid
Y.5	Jumlah BLT yang saya terima sesuai dengan informasi yang diberikan	0.452	0.297	Valid
Y.6	Proses pencairan BLT dilakukan dengan mudah dan tidak rumit	0.532	0.297	Valid
Y.7	BLT yang saya terima membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	0.462	0.297	Valid
Y.8	Program BLT mengurangi beban ekonomi saya dan keluarga	0.472	0.297	Valid
Y.9	Saya merasa puas dengan pelaksanaan program BLT yang dilakukan oleh Pemerintah	0.347	0.297	Valid

No	Kinerja Pemerintah	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
Y.10	Bantuan ini membantu saya mengatasi kesulitan di masa mendesak	0.462	0.297	Valid
Y.11	Program BLT membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat	0.560	0.297	Valid
Y.12	Saya merasa lebih percaya pada pemerintah setelah menerima BLT ini	0.448	0.297	Valid
Y.13	Program BLT ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Desa saya	0.432	0.297	Valid

*Sumber Data Diolah (2025)*

Hasil uji validitas yang tercantum dalam tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan setiap pertanyaan memperoleh nilai  $r$  hitung yang lebih besar dari nilai  $r$  tabel, sehingga item-item dalam angket tersebut dianggap valid.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi kuesioner berdasarkan indikator dan variabel yang digunakan. Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban responden tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*, di mana instrumen dalam kuesioner dianggap reliabel jika nilai koefisien *Cronbach Alpha* yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas X<sup>1</sup>**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.739	10

**Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas X<sup>2</sup>**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.824	9

**Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Z**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.886	15

**Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.639	13

Hasil uji reliabilitas yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk semua variabel melebihi 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja adalah valid dan reliabel sebagai alat ukur untuk variabel-variabel tersebut.

#### **4.5 Hasil Uji Hipotesis**

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Sementara itu, hipotesis H3 dan H4 diuji menggunakan pendekatan analisis moderasi dengan memeriksa nilai selisih mutlak residual. Seluruh proses pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.0 untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

#### 4.5.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis H1 dan H2

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan melalui analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Berikut adalah hasil dari analisis tersebut:

##### 1. Koefisien Determinan

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ):

**Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 <sup>a</sup>	.805	.801	.77312

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah

*Sumber Data Diolah (2025)*

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang disajikan dalam tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai R square mencapai 0,805, yang mengindikasikan bahwa 80,5% dari kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, 19,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

##### 2. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Sebuah variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

**Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		tandardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,673	,566		31,562	,000
Akuntabilitas (X1)	,221	,026	,433	9,053	,000
Transparansi (X2)	,273	,027	,514	10,374	,000

Dependent Variable: Kinerja Pemerintah

**a) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah**

Merujuk pada tabel 4.18, akuntabilitas menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,053 yang lebih besar dari t tabel 1,976 (sig = 0,05 dan  $df = n - k - 1$ , yaitu  $44 - 3 - 1 = 40$ ). Koefisien beta unstandardized untuk akuntabilitas adalah 0,221 dan tingkat signifikan adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian, hipotesis ini diterima. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, yang berarti bahwa peningkatan akuntabilitas akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.

**b) Pengaruh Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan tabel 4.18, variabel transparansi menunjukkan nilai t hitung sebesar 10,374 yang juga lebih besar dari t tabel yaitu 1,976 (sig = 0,05 dan  $df = n - k - 1$ , yaitu  $44 - 3 - 1 = 40$ ). Koefisien beta unstandardized untuk transparansi adalah 0,273, dan tingkat signifikansinya adalah 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, semakin baik pula kinerja pemerintah.

#### 4.5.2 Hasil Uji Regresi Moderasi Berganda Hipotesis H<sub>3</sub> Dan H<sub>4</sub>. Uji Koefisien Determinan

**Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinan R<sup>2</sup>  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
<b>1</b>	.827 <sup>a</sup>	.866	.863	.65975

a. Predictors: (Constant), X2M, Akuntabilitas (X1), Sistem Pengendalian Internal (Z), Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (X2), X1M

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah

*Sumber Data Diolah (2025)*

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.19, nilai R square dari analisis regresi moderasi memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel independen dan dependen dipengaruhi oleh variabel moderasi. Dalam tabel tersebut, nilai R square tercatat sebesar 0,866, yang berarti 86,6% dari pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi, dengan pengaruh tersebut dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Sementara itu, sisanya, yaitu 13,4%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam fokus penelitian ini.

### 4.5.3 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		tandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,858	3,833		5,703	,000
Akuntabilitas (X1)	,521	,126	,833	2,973	,003
Transparansi (X2)	-,373	,127	-,651	-	,031
Sistem Pengendalian Internal (Z)	-,120	-,177	-,191	2,374	,372
X1Z	-,012	,008	-,990	-,733	,064
X2Z	,024	,008	1,778	-	,000
				1,865	
				3,845	

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah  
*Sumber Data Diolah (2025)*

**a) Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (H<sub>3</sub>).**

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.20, variabel X1Z menunjukkan t hitung sebesar -1,865 yang lebih kecil dari t tabel 1,976. Koefisien beta unstandardized sebesar -0,012 dan tingkat signifikansi 0,064 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H<sub>3</sub> tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, hipotesis ketiga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah.

**b) Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Transparansi Bantuan Lagsung Tunai Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah.**

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.20, variabel moderasi X2Z menunjukkan t hitung sebesar 3,845 yang lebih besar dari t tabel 1,976, dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,024 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara transparansi bantuan langsung tunai dana desa dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, hipotesis keempat menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi bantuan langsung tunai dana desa terhadap kinerja pemerintah.

#### **4.6 Pembahasan**

##### **4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan BLT-DD Terhadap Kinerja Pemerintah**

Hasil uji regresi linier berganda (Tabel 4.18) menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (Y) dengan nilai t-hitung 9,053 (lebih besar dari t-tabel 1,976), koefisien regresi (B) 0,221, koefisien beta 0,433, dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Artinya, hipotesis H1 diterima, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Koefisien regresi 0,221 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit akuntabilitas akan meningkatkan kinerja pemerintah desa sebesar 0,221 unit, dengan kontribusi relatif sebesar 43,3%.

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang menekankan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah desa) untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada prinsipal (masyarakat). Dalam konteks Desa Sekban, akuntabilitas tercermin dari indikator seperti kejujuran petugas, keterbukaan proses penyaluran, dan kepatuhan terhadap tujuan program BLT-DD (Tabel 4.5). Skor rata-rata tertinggi (4,38) pada pernyataan bahwa program BLT

dirancang untuk masyarakat yang membutuhkan menunjukkan bahwa masyarakat merasa pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Namun, skor rendah (3,12) pada penjelasan tahapan penyaluran mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi.

Penelitian Triana et al. (2023) mendukung temuan ini, menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-DD meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kinerja pemerintah desa melalui pelaporan yang transparan dan kepatuhan terhadap regulasi. Demikian pula, Martadinata dan Safitri (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas yang didukung sistem akuntansi yang tepat waktu memperkuat tata kelola dana desa, sehingga meningkatkan efektivitas program bantuan. Di Desa Sekban, akuntabilitas yang tinggi tampaknya telah membantu memastikan bahwa BLT-DD disalurkan kepada penerima yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh kepuasan responden (skor 4,24) terhadap dampak BLT pada kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kurangnya penjelasan tahapan penyaluran (X1.5) menunjukkan adanya tantangan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sebagaimana juga ditemukan oleh Agustin dan Purba (2023), yang mencatat bahwa kurangnya sosialisasi dapat menghambat akuntabilitas penuh. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi untuk memastikan semua tahapan proses BLT-DD dipahami masyarakat, sehingga memperkuat kinerja pemerintah desa.

#### **4.6.2 Pengaruh Transparansi BLT-DD terhadap Kinerja Pemerintah**

Hasil uji regresi linier berganda (Tabel 4.18) menunjukkan bahwa transparansi (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan nilai t-hitung 10,374 (lebih besar dari t-tabel 1,976), koefisien regresi (B) 0,273, koefisien beta 0,514, dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis H2 diterima, menegaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Koefisien regresi 0,273 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit transparansi meningkatkan kinerja pemerintah sebesar 0,273 unit, dengan kontribusi relatif 51,4%, lebih besar dibandingkan akuntabilitas.

Temuan ini mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan transparansi sebagai pilar utama untuk membangun kepercayaan masyarakat (Hamsinar, 2017). Di Desa Sekban, transparansi tercermin dari keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan penyampaian prosedur penyaluran BLT-DD (Tabel 4.6). Skor rata-rata tinggi (4,29) pada pernyataan tentang tidak adanya biaya tambahan dan kemudahan memahami kriteria BLT menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil menyediakan informasi yang jelas. Namun, skor rendah (2,70–2,71) pada saluran pengaduan dan pengetahuan tentang pelaporan pelanggaran mengindikasikan kelemahan dalam mekanisme pengawasan masyarakat.

Penelitian Lazulfa (2024) mendukung temuan ini, menegaskan bahwa transparansi dalam penyaluran BLT-DD meningkatkan penerimaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan dialog aktif. Selain itu, Daud et al. (2022) menyatakan bahwa keterbukaan akses informasi mendorong partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Di Desa Sekban, transparansi yang tinggi tampaknya telah memperkuat kepercayaan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh skor 4,21 pada pernyataan bahwa BLT meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah (Tabel 4.8). Hal ini sejalan dengan temuan G. Sari (2022), yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efektivitas program bantuan.

Namun, kelemahan dalam saluran pengaduan menunjukkan perlunya perbaikan, seperti yang juga diidentifikasi oleh Maspawati et al. (2023), yang mencatat bahwa kesenjangan informasi dapat menghambat transparansi penuh. Pemerintah Desa Sekban dapat meningkatkan kinerjanya dengan menyediakan saluran pengaduan yang lebih efektif dan meningkatkan sosialisasi mekanisme pelaporan, sehingga memperkuat persepsi transparansi dan kepercayaan masyarakat.

### **4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas Pada Pengelolaan BLT-DD Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil uji regresi moderasi (Tabel 4.20) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (Z) tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas (X1) dan kinerja pemerintah desa (Y). Nilai t-hitung untuk interaksi X1Z adalah -1,865 (lebih kecil dari t-tabel 1,976), dengan koefisien regresi -0,012 dan nilai signifikansi 0,064 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena itu, hipotesis H3 ditolak, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memperkuat atau melemahkan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. Hasil ini memenuhi kriteria moderasi homologiser, di mana sistem pengendalian internal tidak memiliki efek interaksi yang signifikan.

Temuan ini bertentangan dengan ekspektasi awal bahwa sistem pengendalian internal akan memperkuat akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mendukung efektivitas dan kepatuhan organisasi. Di Desa Sekban, meskipun indikator sistem pengendalian internal seperti aturan yang jelas dan verifikasi data penerima memperoleh skor tinggi (4,18–4,28, Tabel 4.7), sistem ini tampaknya tidak berperan sebagai katalis dalam hubungan antara akuntabilitas dan kinerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya variasi dalam penerapan sistem pengendalian internal, sehingga tidak menghasilkan efek moderasi yang signifikan.

Penelitian Kusnadi dan Anwar (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi hanya jika disertai dengan pelatihan dan komitmen yang kuat dari petugas desa. Di Desa Sekban, skor rata-rata rendah (3,56) pada pemberitahuan melalui media atau petugas desa (Z12) mengindikasikan bahwa komunikasi internal mungkin belum optimal, sehingga melemahkan peran moderasi sistem pengendalian internal. Selain itu, Rahmany dan Fatimah (2020) mencatat bahwa sistem pengendalian internal sering kali tidak efektif

sebagai moderator jika organisasi memiliki sumber daya terbatas, seperti di desa-desa kecil seperti Sekban dengan hanya 302 kepala keluarga.

Meskipun sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan ini, akuntabilitas itu sendiri tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (H1). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Sekban lebih bergantung pada komitmen petugas dan kepercayaan masyarakat daripada pada sistem pengendalian internal. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah desa dapat memperkuat pelatihan dan pemantauan internal, seperti yang disarankan oleh Mattoasi et al. (2021), untuk memastikan sistem pengendalian internal dapat mendukung akuntabilitas secara lebih signifikan.

#### **4.6.4 Pengaruh Transparansi Pada Pengelolaan BLT-DD Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil uji regresi moderasi (Tabel 4.20) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (Z) memoderasi hubungan antara transparansi (X2) dan kinerja pemerintah desa (Y). Nilai t-hitung untuk interaksi X2Z adalah 3,845 (lebih besar dari t-tabel 1,976), dengan koefisien regresi 0,024 dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis H4 diterima, menegaskan bahwa sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara transparansi dan kinerja pemerintah desa. Hasil ini memenuhi kriteria moderasi pure, di mana sistem pengendalian internal secara signifikan memengaruhi hubungan antara transparansi dan kinerja.

Temuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memastikan efektivitas kegiatan dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada gilirannya mendukung transparansi. Di Desa Sekban, sistem pengendalian internal yang kuat, seperti aturan yang jelas (skor 4,21) dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan (skor 4,28, Tabel 4.7), tampaknya telah memperkuat efek transparansi terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, verifikasi data penerima dan pemantauan aktif (skor 4,18–4,23) memastikan bahwa informasi yang

disampaikan secara transparan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kinerja pemerintah desa.

Penelitian Khoer dan Atnawi (2022) mendukung temuan ini, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif memperkuat transparansi dengan memastikan bahwa informasi keuangan dan operasional disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, Fazlurahman et al. (2020) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan, seperti di Desa Sekban, meningkatkan kepercayaan dan efektivitas program bantuan. Skor tinggi pada kinerja pemerintah (4,28) untuk dampak positif BLT-DD (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa transparansi yang didukung oleh sistem pengendalian internal telah meningkatkan kepuasan masyarakat.

Namun, skor rendah pada pemberitahuan melalui media (3,56) menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi proaktif, seperti yang disarankan oleh G. Sari (2022), untuk memaksimalkan efek moderasi. Dengan memperkuat saluran informasi dan pelatihan bagi petugas, sistem pengendalian internal dapat lebih efektif mendukung transparansi, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-DD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa terhadap kinerja pemerintah, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban dalam pengelolaan BLT-DD. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung 9,053 (lebih besar dari t-tabel 1,976) dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Peningkatan akuntabilitas, seperti kejujuran petugas, keterbukaan proses, dan kepatuhan terhadap tujuan program, berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah desa, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban dalam pengelolaan BLT-DD. Dengan nilai t-hitung 10,374 (lebih besar dari t-tabel 1,976) dan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05), transparansi melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan penyampaian prosedur yang jelas memperkuat kepercayaan masyarakat dan efektivitas penyaluran BLT-DD, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah desa.
3. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah Desa Sekban. Hasil uji moderasi menunjukkan nilai t-hitung -1,865 (lebih kecil dari t-tabel 1,976) dengan signifikansi 0,064 (lebih besar dari 0,05), sehingga hipotesis H3 ditolak. Sistem pengendalian internal, meskipun memiliki indikator yang kuat seperti aturan yang jelas dan verifikasi data, tidak memperkuat atau melemahkan pengaruh akuntabilitas terhadap

kinerja pemerintah desa, kemungkinan karena keterbatasan variasi penerapan atau komunikasi internal.

4. Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara transparansi dan kinerja pemerintah Desa Sekban. Dengan nilai t-hitung 3,845 (lebih besar dari t-tabel 1,976) dan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05), hipotesis H4 diterima. Sistem pengendalian internal, melalui mekanisme seperti verifikasi data, pemantauan aktif, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, memperkuat efek transparansi terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pengelolaan BLT-DD

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan BLT-DD dan kinerja pemerintah Desa Sekban, serta sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya:

1. Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Penyaluran BLT-DD untuk Mendukung Akuntabilitas. Pemerintah Desa Sekban perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait tahapan penyaluran BLT-DD, mengingat skor rendah (3,12) pada indikator penjelasan tahapan (Tabel 4.5). Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat desa, papan pengumuman, atau media sosial untuk memastikan semua tahapan dipahami masyarakat, sehingga meningkatkan persepsi akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian Agustin dan Purba (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Memperbaiki Saluran Pengaduan dan Mekanisme Pelaporan untuk Meningkatkan Transparansi. Skor rendah pada indikator saluran pengaduan (2,71) dan pengetahuan tentang pelaporan pelanggaran (2,70, Tabel 4.6) menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan masyarakat. Pemerintah desa disarankan untuk menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, seperti kotak saran atau nomor kontak resmi, serta

menyosialisasikan prosedur pelaporan. Menurut Lazulfa (2024), mekanisme pengaduan yang efektif dapat memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah desa.

3. Meningkatkan Kapasitas Sistem Pengendalian Internal melalui Pelatihan. Meskipun sistem pengendalian internal memiliki indikator yang kuat, ketidakmampuannya memoderasi hubungan akuntabilitas dan kinerja menunjukkan perlunya peningkatan implementasi. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelatihan bagi petugas tentang pengelolaan keuangan, verifikasi data, dan pemantauan, seperti yang disarankan oleh Kusnadi dan Anwar (2023). Pelatihan ini dapat membantu sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pendukung akuntabilitas, bukan hanya transparansi.
4. Mengoptimalkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan BLT-DD. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan (skor 4,28, Tabel 4.7) telah memperkuat transparansi, tetapi komunikasi proaktif melalui media atau petugas masih lemah (skor 3,56). Pemerintah desa disarankan untuk menggunakan saluran komunikasi yang lebih beragam, seperti WhatsApp atau pengumuman langsung, untuk memperbarui informasi BLT-DD. G. Sari (2022) menekankan bahwa komunikasi proaktif meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat transparansi dan kinerja pemerintah.
5. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini terbatas pada Desa Sekban dengan sampel 44 responden, sehingga generalisasi temuan mungkin terbatas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan ke desa lain di Kabupaten Fakfak atau memasukkan variabel tambahan, seperti partisipasi masyarakat atau kompetensi petugas desa, untuk memahami faktor lain yang memengaruhi kinerja pemerintah. Selain itu, analisis kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat dan pemerintah secara lebih mendalam, sebagaimana disarankan oleh Maspawati et al. (2023).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33–44.
- Agustin, H., & Purba, I. P. M. H. (2023). PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BULU KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 295–314.
- Ahyaruddin, M., Yusoff, M. N. H. Bin, Zainuddin, S. A. B., & Agustiawan, A. (2023). Research trend on accountability and government performance: A bibliometric analysis approach. *Journal of Accounting and Investment*, 24(3), 974–992. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i3.20307>
- Ambarwati, K., & Wafiroh, N. L. (2024). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 7(2), 128–137.
- Atika, N. (2023). *Analisis Transparansi dan akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene*. IAIN Parepare.
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706.
- Baina, N., & Michael, M. N. (2020). Accounting Information Systems and Financial Accountability in Bushenyi District Local Government in Western Uganda. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(9), 1–7.

<https://doi.org/10.7176/rjfa/11-9-01>

- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>
- Bora, M. Y., Herdi, H., & Salvanos, Y. Y. (2024). Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(4), 373–396.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Persepsi Perilaku Prosocial dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Peran Moderasi Pengendalian Internal dan Kepemimpinan. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–24.
- Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2022). Factors affecting accountability village fund management. *Linguistics and Culture Review*, 879–892.
- Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2023). Accountability and Perception of Prosocial Behavior in Village Fund Management. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1), 124–132. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1art12>
- Fadhilla, R. A., & Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 38–47.
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

- (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *UMMagelang Conference Series*, 584–605.
- Faturahman, F. (2020). Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7254>
- Fazlurahman, F., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 56–62.
- Felina Kusuma, A. (2021). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Fitriani, D., Shauki, E. R., & Pratiwi, S. C. (2020). Village fund accountability and gendering in Masculine Hegemonic Institution: A study during COVID-19. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 4(2), 386–415. <https://doi.org/10.7454/ajce.v4i2.1106>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 20–35.
- Hanifah, S., Abdillah, T. D. F., & Wachyudi, K. (2022). Analisis bibliometrik dalam mencari research gap menggunakan aplikasi vosviewer dan aplikasi publish or perish. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2713–2728.
- Haris, A., Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah

- Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 34–42.
- Hoai, T. T., Hung, B. Q., & Nguyen, N. P. (2022). The impact of internal control systems on the intensity of innovation and organizational performance of public sector organizations in Vietnam: the moderating role of transformational leadership. *Heliyon*, 8(2).
- Indriasih Dewi, D. (2022). The role of commitment, competence, internal control system, transparency and accessibility in predicting the accountability of village fund management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). Transparency and Accountability of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.69989/b216ta79>
- Khan, S. F., Junita, A., & Azhar, I. (2023). DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PERILAKU PEMIMPIN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 60–71.
- Kusnadi, K., & Anwar, A. P. (2023). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 59–74.
- Kusumo, W. K., Achmad, T., & Zulaikha. (2022). Effectiveness of Internal Control

System as Early Detection Tool in Fraud Prevention of Village Fund Management. *Review of Economics and Finance*, 20, 119–123. <https://doi.org/10.55365/1923.X2022.20.12>

Lazulfa, A. S. (2024). Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 109–120.

Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(09), 19–29.

M. Daud, R., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 133–143.

Magfiroh, N. (2020). *Analisis Penerapan Pengukuran Value For Money pada APBDES dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)*. Universitas Bhayangkara.

Mahmud, A., Susilowati, N., Handayani, B. D., Leonita, A., & Santoso, A. (2024). Smart village: Evaluating the role of Siskeudes management in enhancing village fund accountability. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 7712–7725. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3679>

Martadinata, S., & Safitri, N. L. (2024). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIDESA SEMPE KEMACATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA. *Proceeding Of Student Conference*, 2(5), 301–308.

- Maspawati, M., Bakri, B., & Afdal, A. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 82–96.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mbulo, D., Musawa, N., Clement, M., & Lubinda, M. S. (2022). *The Effect of Internal Controls and the Audit Committee on financial Accountability in local Authorities*. 3(1), 1–11.
- Melasari, R., ROSLIANA, R., & SILVIONITA, P. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 106–118. <https://doi.org/10.32520/jak.v11i2.2263>
- Michael, M. N., Burani, A., Enock, O. N., & Eric, M. (2020). Control Activities and Financial Accountability in South Nyanza County Governments in Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(6), 32–38.
- Mohammed, A., Buba, A., & Ahmed, U. O. (2023). Effect of Financial Regulations on Accountability of Some Selected Public Organizations in Nigeria. *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR]*, 1(1), 157–174.
- Nagriwum, T. M., Richard, W., Gbolo, S. S., Kuunyig, M., Seth, D., & Amokase, M. A. (2023). Transparency and Accountability in Local Government Financial Management in Ghana: A Case of Sunyani West Municipal Assembly. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(9), 689–710.
- Napari, A. S., & Amaning, E. O. (2022). The role of public sector accounting on

- accountability in public institutions in Ghana. *European Journal of Business and Management*, 14(20), 47–58.
- Nnko, K. G. (n.d.). *Examining Stakeholder's Perception on the Effectiveness of Accounting Practices in Promoting Accountability and Transparencies in the Public Sector in Tanzania*.
- Pratama, Y. (2024). *AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 17(2), 206–220.
- Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123.
- Ropi, P., Wijaya, A. F., & Papilaya, F. S. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat. *Buletin Poltanesa*, 22(1), 11–14.
- Samuel, O. O., & Rufus, A. I. (2024). Transparency and Accountability Concerns in the Nigerian Public Sector. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(6), 2406–2416.
- Sari, G. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau.
- Sari, S. P., & Fuadi, F. (2024). *PENGARUH SPIP DAN TRANSPARANSI TERHADAP*

*AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH: APAKAH CHANGE MANAGEMENT DAN PERGANTIAN KEPEMIMPINAN MAMPU MEMODERASI ?* 7(2), 383–406.

Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik terhadap pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di suku Boti. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 204–223.

Sudarmn, S. (2024). *Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Watang Kassa Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.

Sugiarto, S. (2024). Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 3(2), 106–112.

Teguh, M. T. S., Wulan, T. N., & Juansah, D. E. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5962–5974.

Triana, E., Rahman, A., & Fatih, H. M. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(2), 134–145.

Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village. *BENEFIT*, 7(1), 66–73.

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>

Winarti, W., & Priyastivi, P. (2023). EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KEDU KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG. *Jurnal Riset*

*Mahasiswa, I(1), 183–197.*

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Instrumen Penelitian

### Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan / Laki-laki

Pendidikan Terakhir :

- Tidak Sekolah
- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1

Status Pekerjaan :

- Bekerja
- Tidak Bekerja
- Lainnya: \_\_\_\_\_

Petunjuk pengisian

Isilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan centang (√) pada kolom yang tersedia.

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Kurang Setujua (KS) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Akuntabilitas BLT (X<sub>1</sub>)

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
1.	Saya merasa petugas penyalur BLT bertindak dengan jujur dan tidak memihak.					
2.	Tidak ada penyelewengan dana BLT yang saya ketahui dalam penyalurannya.					
3.	Proses penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.					
4.	Saya merasa data penerima BLT diproses dengan adil dan transparan.					
5.	Semua tahapan penyaluran BLT dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah desa.					
6.	Program BLT ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.					
7.	Penyaluran BLT dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.					
8.	Saya merasa program BLT ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa.					
9.	Kebijakan mengenai penerimaan BLT sudah disosialisasikan kepada masyarakat.					
10.	Saya merasa kebijakan BLT ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					

Transparansi BLT (X<sub>2</sub>)

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
1.	Informasi terkait BLT tidak pernah berubah secara mendadak tanpa pemberitahuan.					
2.	Prosedur untuk menerima BLT dijelaskan secara rinci oleh pemerintah desa.					
3.	Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan dalam proses penerimaan BLT.					
4.	Saya merasa informasi terkait kriteria dan syarat penerimaan BLT mudah dipahami.					
5.	Saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BLT dari pemerintah desa.					
6.	Pemerintah desa menggunakan berbagai cara (misalnya, papan pengumuman, media sosial, atau rapat) untuk menyampaikan informasi terkait BLT.					
7.	Informasi terkait BLT tersedia dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan.					
8.	Pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah terkait BLT.					
9.	Saya mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran BLT					

Sistem Pengendalian Internal (Z)

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
1.	Pemerintah desa memiliki aturan yang jelas dalam menyalurkan BLT					
2.	Petugas penyalur BLT bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
3.	Saya merasa pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan BLT disalurkan dengan baik					
4.	Pemerintah desa memastikan penerima BLT benar-benar sesuai dengan kriteria					
5.	Resiko kesalahan dalam penyaluran BLT sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah					
6.	Pemerintah desa mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BLT					
7.	Proses penyaluran BLT dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal					
8.	Pemerintah selalu memverifikasi data penerima BLT sebelum penyaluran					
9.	Saya merasa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran BLT di desa saya					
10.	Informasi terkait jadwal dan tata cara penyaluran BLT diberikan dengan jelas kepada masyarakat					

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
11.	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait BLT secara terbuka dan jelas					
12.	Saya selalu mendapatkan pemberitahuan terkait BLT melalui media atau petugas Desa					
13.	Pemerintah desa aktif memantau proses penyaluran BLT untuk memastikan berjalan sesuai aturan					
14.	Ada tindak lanjut dari pemerintah jika terjadi kesalahan atau masalah dalam penyaluran BLT					
15.	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT					

#### Kinerja Pemerintah (Y)

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
1.	Data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang Membutuhkan					
2.	Saya merasa pemerintah memiliki persiapan yang baik sebelum menyalurkan BLT					
3.	Proses pendaftaran penerima BLT dilakukan dengan jelas dan terbuka					

No	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		(5) Sangat Setuju	(4) Setuju	(3) Kurang Setuju	(2) Tidak Setuju	(1) Sangat Tidak Setuju
4.	Saya merasa BLT tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan					
5.	Jumlah BLT yang saya terima sesuai dengan informasi yang diberikan					
6.	Proses pencairan BLT dilakukan dengan mudah dan tidak rumit					
7.	BLT yang saya terima membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari					
8.	Program BLT mengurangi beban ekonomi saya dan keluarga					
9.	Saya merasa puas dengan pelaksanaan program BLT yang dilakukan oleh Pemerintah					
10.	Bantuan ini membantu saya mengatasi kesulitan di masa mendesak					
11.	Program BLT membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat					
12.	Saya merasa lebih percaya pada pemerintah setelah menerima BLT ini					
13.	Program BLT ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Desa saya					



Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	TotalZ
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	65
3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	42
4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	50
4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	68
5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	69
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	66
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	67
4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	3	3	61
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	62
4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	65
4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	67
4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	67
4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	63
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	66
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	66
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	65
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	64
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	69
4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	69
4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	67
4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	67
4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	67
4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	67
4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	67
4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	67
4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	68
4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	67
4	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	64
5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	2	64
4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	66
4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	66
4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	66
4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	68
4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	65
4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	67
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	67
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	67
4	4	4	4	3	3	3	5	5	4	5	4	4	3	4	60
4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	65
4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	65
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	64
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	64
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	64
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	64
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	66
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	65

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	TotalY
4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	59
3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	34
3	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	54
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	59
4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	55
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
5	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	58
5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	3	4	58
4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57
4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	58
5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	57
5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	56
4	5	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	58
4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	57
5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	57
5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	57
5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	57
5	4	2	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	56
5	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	56
5	4	2	4	5	5	4	5	2	4	4	5	4	56
5	4	2	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	55
5	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	55
4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	59
5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	60
5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	60
4	4	3	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	54
4	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	56
5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	60
4	4	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	58
4	4	3	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	57
5	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	55
5	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	59
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	59
5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	58
5	5	3	5	3	5	4	5	4	4	4	5	5	57
4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	57

Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif

No	Akuntabilitas	N	Rata-Rata	Kategori
X1.1	Saya merasa petugas penyalur BLT bertindak dengan jujur dan tidak memihak.	44	4.23	Setuju (ST)
X1.2	Tidak ada penyelewengan dana BLT yang saya ketahui dalam penyalurannya.	44	4.25	Setuju (ST)
X1.3	Proses penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.	44	4.21	Setuju (ST)
X1.4	Saya merasa data penerima BLT diproses dengan adil dan transparan.	44	4.26	Setuju (ST)
X1.5	Semua tahapan penyaluran BLT dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah desa.	44	3.12	Kurang Setujua (KS)
X1.6	Program BLT ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	44	4.38	Sangat Setuju (SS)
X1.7	Penyaluran BLT dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.	44	4.21	Setuju (ST)
X1.8	Saya merasa program BLT ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa.	44	4.28	Setuju (SS)
X1.9	Kebijakan mengenai penerimaan BLT sudah disosialisasikan kepada masyarakat.	44	4.29	Setuju (ST)
X1.10	Saya merasa kebijakan BLT ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	44	4.24	Setuju (ST)

No	Transparansi	N	Rata-Rata	Kategori
X2.1	Informasi terkait BLT tidak pernah berubah secara mendadak tanpa pemberitahuan	44	4.20	Setuju (ST)
X2.2	Prosedur untuk menerima BLT dijelaskan secara rinci oleh pemerintah desa.	44	4.27	Setuju (ST)

<b>No</b>	<b>Transparansi</b>	<b>N</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kategori</b>
X2.3	Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan dalam proses penerimaan BLT.	44	4.29	Setuju (ST)
X2.4	Saya merasa informasi terkait kriteria dan syarat penerimaan BLT mudah dipahami.	44	4.29	Setuju (ST)
X2.5	Saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BLT dari pemerintah desa.	44	4.20	Setuju (ST)
X2.6	Pemerintah desa menggunakan berbagai cara (misalnya, papan pengumuman, media sosial, atau rapat) untuk menyampaikan informasi terkait BLT.	44	3,42	Setuju (ST)
X2.7	Informasi terkait BLT tersedia dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan.	44	4.27	Setuju (ST)
X2.8	Pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah terkait BLT.	44	2,71	Kurang Setuju (KS)
X2.9	Saya mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran BLT	44	2.70	Kurang Setuju (KS)

<b>No</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>N</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kategori</b>
Z1	Pemerintah desa memiliki aturan yang jelas dalam menyalurkan BLT	44	4.21	Setuju (ST)
Z2	Petugas penyalur BLT bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	44	4.22	Setuju (ST)
Z3	Saya merasa pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan BLT disalurkan dengan baik	44	4.24	Setuju (ST)
Z4	Pemerintah desa memastikan penerima BLT benar-benar sesuai dengan kriteria	44	4.26	Setuju (ST)
Z5	Resiko kesalahan dalam penyaluran BLT sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah	44	3.90	Setuju (ST)

<b>No</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>N</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kategori</b>
Z6	Pemerintah desa mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BLT	44	4.12	Setuju (ST)
Z7	Proses penyaluran BLT dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal	44	3.89	Setuju (ST)
Z8	Pemerintah selalu memverifikasi data penerima BLT sebelum penyaluran	44	4.18	Setuju (ST)
Z9	Saya merasa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran BLT di desa saya	44	4.23	Setuju (ST)
Z10	Informasi terkait jadwal dan tata cara penyaluran BLT diberikan dengan jelas kepada masyarakat	44	4.19	Setuju (ST)
Z11	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait BLT secara terbuka dan jelas	44	3.92	Setuju (ST)
Z12	Saya selalu mendapatkan pemberitahuan terkait BLT melalui media atau petugas desa	44	3.56	Setuju (ST)
Z13	Pemerintah desa aktif memantau proses penyaluran BLT untuk memastikan berjalan sesuai aturan	44	3.68	Setuju (ST)
Z14	Ada tindak lanjut dari pemerintah jika terjadi kesalahan atau masalah dalam penyaluran BLT	44	3.90	Setuju (ST)
Z15	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT	44	4.28	Setuju (ST)

<b>No</b>	<b>Kinerja Pemerintah</b>	<b>N</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kategori</b>
Y.1	Data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan	44	4.12	Setuju (ST)
Y.2	Saya merasa pemerintah memiliki persiapan yang baik sebelum menyalurkan BLT	44	3.89	Setuju (ST)
Y.3	Proses pendaftaran penerima BLT dilakukan dengan jelas dan terbuka	44	4.18	Setuju (ST)

No	Kinerja Pemerintah	N	Rata-Rata	Kategori
Y.4	Saya merasa BLT tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	44	4.23	Setuju (ST)
Y.5	Jumlah BLT yang saya terima sesuai dengan informasi yang diberikan	44	4.19	Setuju (ST)
Y.6	Proses pencairan BLT dilakukan dengan mudah dan tidak rumit	44	3.92	Setuju (ST)
Y.7	BLT yang saya terima membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	44	4.26	Setuju (ST)
Y.8	Program BLT mengurangi beban ekonomi saya dan keluarga	44	4.26	Setuju (ST)
Y.9	Saya merasa puas dengan pelaksanaan program BLT yang dilakukan oleh Pemerintah	44	4.26	Setuju (ST)
Y.10	Bantuan ini membantu saya mengatasi kesulitan di masa mendesak	44	3.82	Setuju (ST)
Y.11	Program BLT membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat	44	3.90	Setuju (ST)
Y.12	Saya merasa lebih percaya pada pemerintah setelah menerima BLT ini	44	4.21	Setuju (ST)
Y.13	Program BLT ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Desa saya	44	4.28	Setuju (ST)

#### Lampiran 4 Uji Validitas

No	Akuntabilitas	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
X1.1	Saya merasa petugas penyalur BLT bertindak dengan jujur dan tidak memihak.	0.508	0.297	Valid
X1.2	Tidak ada penyelewengan dana BLT yang saya ketahui dalam penyalurannya.	0.302	0.297	Valid
X1.3	Proses penyaluran BLT dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.	0.568	0.297	Valid

<b>No</b>	<b>Akuntabilitas</b>	<b>r<sup>hitung</sup></b>	<b>r<sup>tabel</sup></b>	<b>Keterangan</b>
X1.4	Saya merasa data penerima BLT diproses dengan adil dan transparan.	0.544	0.297	Valid
X1.5	Semua tahapan penyaluran BLT dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah desa.	0.458	0.297	Valid
X1.6	Program BLT ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	0.302	0.297	Valid
X1.7	Penyaluran BLT dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.	0.418	0.297	Valid
X1.8	Saya merasa program BLT ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa.	0.402	0.297	Valid
X1.9	Kebijakan mengenai penerimaan BLT sudah disosialisasikan kepada masyarakat.	0.570	0.297	Valid
X1.10	Saya merasa kebijakan BLT ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	0.401	0.297	Valid

<b>No</b>	<b>Transparansi</b>	<b>r<sup>hitung</sup></b>	<b>r<sup>tabel</sup></b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	Informasi terkait BLT tidak pernah berubah secara mendadak tanpa pemberitahuan	0.417	0.297	Valid
X2.2	Prosedur untuk menerima BLT dijelaskan secara rinci oleh pemerintah desa.	0.432	0.297	Valid
X2.3	Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan dalam proses penerimaan BLT.	0.570	0.297	Valid
X2.4	Saya merasa informasi terkait kriteria dan syarat penerimaan BLT mudah dipahami.	0.418	0.297	Valid
X2.5	Saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BLT dari pemerintah desa.	0.442	0.297	Valid

<b>No</b>	<b>Transparansi</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
X2.6	Pemerintah desa menggunakan berbagai cara (misalnya, papan pengumuman, media sosial, atau rapat) untuk menyampaikan informasi terkait BLT.	0.432	0.297	Valid
X2.7	Informasi terkait BLT tersedia dan dapat diakses kapan saja jika diperlukan.	0.412	0.297	Valid
X2.8	Pemerintah desa menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah terkait BLT.	0.422	0.297	Valid
X2.9	Saya mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran BLT	0.460	0.297	Valid

<b>No</b>	<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Z1	Pemerintah desa memiliki aturan yang jelas dalam menyalurkan BLT	0.318	0.297	Valid
Z2	Petugas penyalur BLT bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	0.423	0.297	Valid
Z3	Saya merasa pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan BLT disalurkan dengan baik	0.445	0.297	Valid
Z4	Pemerintah desa memastikan penerima BLT benar-benar sesuai dengan kriteria	0.423	0.297	Valid
Z5	Resiko kesalahan dalam penyaluran BLT sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah	0.542	0.297	Valid
Z6	Pemerintah desa mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BLT	0.432	0.297	Valid
Z7	Proses penyaluran BLT dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal	0.312	0.297	Valid
Z8	Pemerintah selalu memverifikasi data penerima BLT sebelum penyaluran	0.372	0.297	Valid

No	Sistem Pengendalian Internal	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Z9	Saya merasa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran BLT di desa saya	0.430	0.297	Valid
Z10	Informasi terkait jadwal dan tata cara penyaluran BLT diberikan dengan jelas kepada masyarakat	0.337	0.297	Valid
Z11	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait BLT secara terbuka dan jelas	0.352	0.297	Valid
Z12	Saya selalu mendapatkan pemberitahuan terkait BLT melalui media atau petugas desa	0.420	0.297	Valid
Z13	Pemerintah desa aktif memantau proses penyaluran BLT untuk memastikan berjalan sesuai aturan	0.568	0.297	Valid
Z14	Ada tindak lanjut dari pemerintah jika terjadi kesalahan atau masalah dalam penyaluran BLT	0.452	0.297	Valid
Z15	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyaluran BLT	0.412	0.297	Valid

No	Kinerja Pemerintah	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Y.1	Data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan	0.370	0.297	Valid
Y.2	Saya merasa pemerintah memiliki persiapan yang baik sebelum menyalurkan BLT	0.348	0.297	Valid
Y.3	Proses pendaftaran penerima BLT dilakukan dengan jelas dan terbuka	0.442	0.297	Valid
Y.4	Saya merasa BLT tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	0.442	0.297	Valid
Y.5	Jumlah BLT yang saya terima sesuai dengan informasi yang diberikan	0.452	0.297	Valid
Y.6	Proses pencairan BLT dilakukan dengan mudah dan tidak rumit	0.532	0.297	Valid
Y.7	BLT yang saya terima membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	0.462	0.297	Valid

No	Kinerja Pemerintah	r <sup>hitung</sup>	r <sup>tabel</sup>	Keterangan
Y.8	Program BLT mengurangi beban ekonomi saya dan keluarga	0.472	0.297	Valid
Y.9	Saya merasa puas dengan pelaksanaan program BLT yang dilakukan oleh Pemerintah	0.347	0.297	Valid
Y.10	Bantuan ini membantu saya mengatasi kesulitan di masa mendesak	0.462	0.297	Valid
Y.11	Program BLT membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat	0.560	0.297	Valid
Y.12	Saya merasa lebih percaya pada pemerintah setelah menerima BLT ini	0.448	0.297	Valid
Y.13	Program BLT ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Desa saya	0.432	0.297	Valid

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reliabilitas X<sup>1</sup>**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.739	10

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas X<sup>2</sup>**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.824	9

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Reliabilitas Z**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.886	15

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Reliabilitas Y**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.639	13

Lampiran 6 Uji Hipotesis

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 <sup>a</sup>	.805	.801	.77312

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	16,673	,566			31,562	,000
Akuntabilitas (X1)	,221	,026	,433		9,053	,000
Transparansi (X2)	,273	,027	,514		10,374	,000

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
<b>1</b>	.827 <sup>a</sup>	.866	.863	.65975

Model	Unstandardized Coefficients		tandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,858	3,833		5,703	,000
Akuntabilitas (X1)	,521	,126	,833	2,973	,003
Transparansi (X2)	-,373	,127	-,651	-	,031
Sistem Pengendalian Internal (Z)	-,120	-,177	-,191	2,374	,372
X1Z	-,012	,008	-,990	-,733	,064
X2Z	,024	,008	1,778	-	,000
				1,865	
				3,845	